



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2023  
KECAMATAN TRENGGALEK

Jl. Pasuruhan No. 10  
TRENGGALEK 65111

[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

## KATA PENGANTAR

**A**tas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Trenggalek dengan baik dan tepat waktu. Adapun penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disamping merupakan sebuah kewajiban, dapat dipahami pula sebagai suatu niat dan tekad yang baik dari Kecamatan Trenggalek sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara utuh dan berkelanjutan.

Dari capaian yang telah dicapai saat ini, kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, maka kami instruksikan kepada semua komponen dalam jajaran Pemerintah Kecamatan Trenggalek agar lebih memahami dan melaksanakan SAKIP dengan baik serta memberikan sumbangsinya baik tenaga, pikiran dan sebagainya sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam pencapaian target kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, semoga hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan pada masa yang akan datang.

Trenggalek, 19 Februari 2024



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Trenggalek selama tahun 2023. Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ini, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan acuan yang dipergunakan adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 dengan membandingkan target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori “TINGGI”, dengan rata-rata persentase capaian sebesar 95,75 %.

Dari segi akuntabilitas keuangan, secara umum pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 termasuk memuaskan dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 89,35%. Dari total anggaran Tahun 2023 sejumlah Rp.8.966.298.168,00 dimana anggaran yang dapat direalisasikan sejumlah Rp.8.011.034.770,00 Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 101 ( seratus satu) Sub Kegiatan.

Meskipun secara umum telah menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan yang akan datang. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kinerja pada Pemerintah Kecamatan Trenggalek di masa yang akan datang.

Trenggalek , Januari 2024

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	3
1.4 Gambaran Umum Kecamatan.....	5
1.5 Isu Strategis.....	10
1.6 Sistematika Pelaporan .....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek .....	16
2.2 Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek	18
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	19
2.4 Rencana Kerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 .....	20
2.5 Perjanjian Kinerja .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023...	25
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa tahun terakhir.....	25
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi.....	27
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	28
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan...	28
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	31
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan	

ataupun pencapaian pernyataan kinerja.....	34
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	37
3.4 Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP.....	41

LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra
2. SK TIM Penyusunan LKjIP Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2023
4. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023

## DAFTAR TABEL

1.1 :	Daftar Pegawai Kecamatan Trenggalek Tahun 2023.....	10
1.2 :	Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Trenggalek.....	12
2.1 :	Tujuan dan Sasaran Pada Renstra Kecamatan Trenggalek....	19
2.2 :	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	20
2.3 :	Perjanjian Kinerja 2023.....	22
2.4 :	Perjanjian Kinerja Perubahan 2023.....	23
3.1 :	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
3.2 :	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 .....	25
3.3 :	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	26
3.4 :	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	27
3.5 :	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	28
3.6 :	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	29
3.7 :	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	32
3.8 :	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	32
3.9 :	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan...	39
3.10 :	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trenggalek Tahun Anggaran 2023.....	37
3.11 :	Analisis Pencapaian Indikator Nilai SAKIP.....	37
3.12 :	Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	38
3.13 :	Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Trenggalek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,



bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Trenggalek mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Trenggalek Tahun 2021-2026, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Trenggalek dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Trenggalek.

## **1.2. TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trenggalek Tahun 2023, secara ringkas adalah untuk :

1. Mendeskripsikan akuntabilitas dan kredibilitas Perangkat Daerah;
2. Mendeskripsikan umpan balik untuk peningkatan kinerja;
3. Mendeskripsikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
4. Mendeskripsikan realisasi capaian kinerja terhadap perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi Perangkat Daerah ;
5. Mendeskripsikan akuntabilitas Perangkat Daerah yang dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan; dan
6. Mendeskripsikan upaya Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trenggalek sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai penyelenggaraan pemerintahan merupakan dokumen yang merekam potret pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di setiap satuan kerja khususnya Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Laporan Kinerja tidak dapat dipisahkan dari sub sistem kinerja yang lain, menyangkut: Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional:
  - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

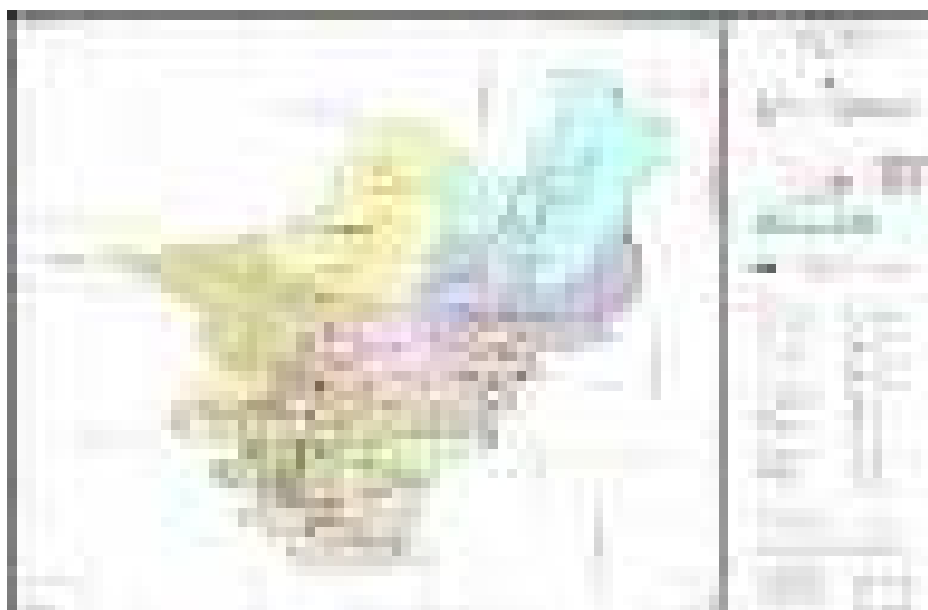
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 21) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
- 22) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023;
- 24) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023;

#### 1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Kecamatan Trenggalek merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan merupakan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan serta Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Kepala Perangkat Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Trenggalek berada di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek. Secara Geografis Kecamatan Trenggalek terletak pada 111°28 – 112°06 Bujur Timur dan 07°56 – 08°31 Lintang Selatan dengan ketinggian 105 dpl dari permukaan laut. Kecamatan Trenggalek terletak di pusat Kota Trenggalek, dan 186 km dari Ibu kota provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 6.107 Ha dimana hampir 66,6% dari luas wilayah Kecamatan Trenggalek merupakan wilayah daratan dan sisanya pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kecamatan Bendungan
2. Sebelah timur : Kecamatan Pogalan
3. Sebelah barat : Kecamatan Karanggen dan Kecamatan Gandusari
4. Sebelah selatan : Kecamatan Karanggen

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Trenggalek



Wilayah Kecamatan Trenggalek terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan dan 8(delapan) desa, yaitu:

A. Kelurahan

- 1) Kelurahan Surodakan
- 2) Kelurahan Sumbergedong
- 3) Kelurahan Ngantru
- 4) Kelurahan Tamanan, dan
- 5) Kelurahan Kelutan.

B. Desa

- 1) Desa Karangsoke
- 2) Desa Sambirejo
- 3) Desa Ngares
- 4) Desa Sumberdadi
- 5) Desa Rejowinangun
- 6) Desa Parakan
- 7) Desa Sukosari, dan
- 8) Desa Dawuhan.

Di Kecamatan Trenggalek, masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang sangat beragam seperti pegawai perkantoran baik pemerintah maupun swasta, bidang perdagangan dan industri karena letaknya di pusat kota dan pusat pemerintahan. Selain itu kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Trenggalek antara lain di bidang pertanian, peternakan, perikanan, transportasi dan jasa lainnya (retail, waralaba dsb).

➤ **Struktur Organisasi**

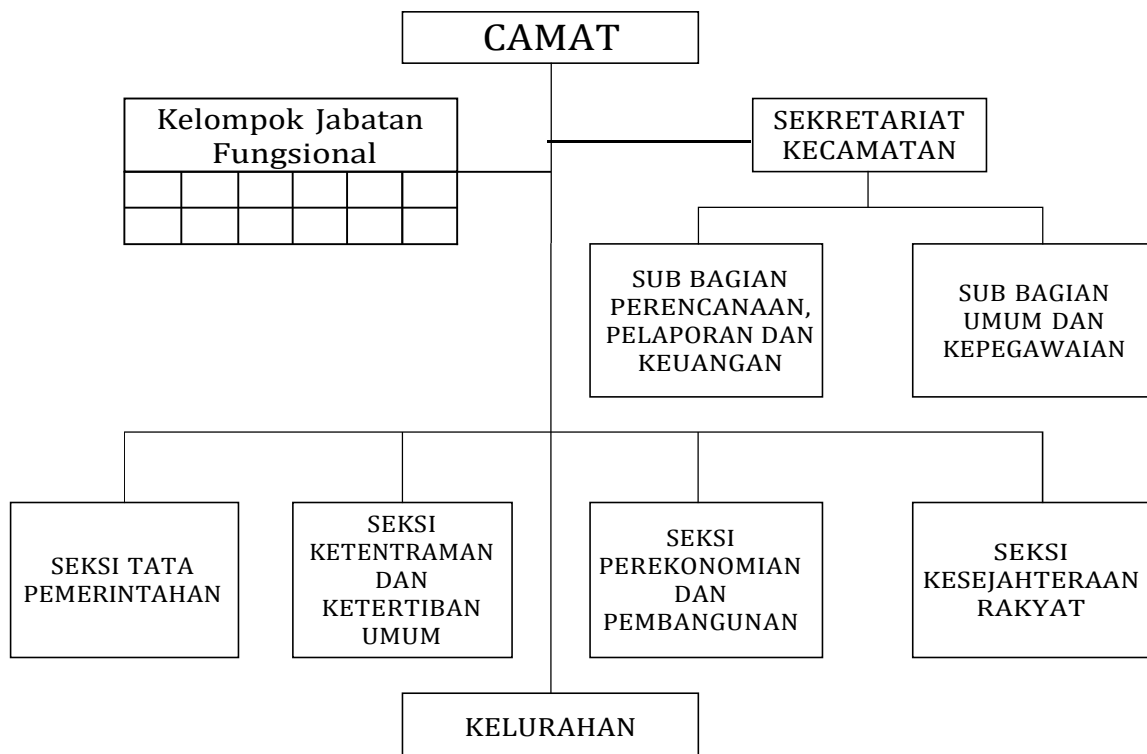
Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan Kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya. Adapun

susunan organisasi Kecamatan Trenggalek terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

➤ **Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Trenggalek



➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan terdiri dari Kecamatan dengan beban kerja besar dan Kecamatan dengan beban kerja kecil. Dan Kecamatan Trenggalek merupakan Kecamatan dengan beban kerja Kecil. Adapun tugas dari

Kecamatan dengan beban kerja Kecil adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan/atau Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

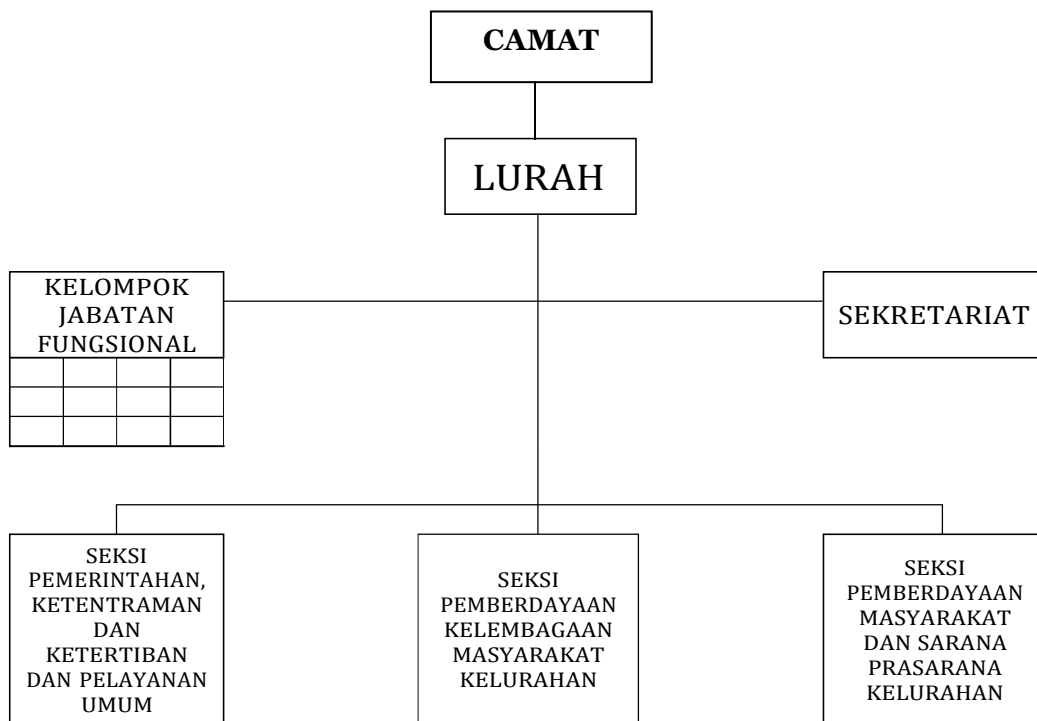
- a) Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya;
- c) Penyelenggaraan ketatausahaan;
- d) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f) Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g) Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- i) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tumpang tantra di wilayah kerjanya; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan pasal 5 menyebutkan bahwa :

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- (3) Kelurahan terdiri atas :
  - a. Kelurahan Tamanan;
  - b. Kelurahan Surodakan;
  - c. Kelurahan Ngantru;
  - d. Kelurahan Sumbergedong; dan
  - e. Kelurahan Kelutan.

Struktur Organisasi Kelurahan digambarkan dalam bagan susunan organisasi sebagaimana tersebut dibawah ini :



Gambar 2

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kelurahan maka Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai di Kecamatan Trenggalek sejumlah 40 orang termasuk yang ada di Kelurahan, dengan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Golongan	Latar Belakang Pendidikan					Jumlah
	SMP	SMA	D IV	S.1	S.2	
I						
II		14				14
III		6	1	16	1	24
IV				2		2
<b>JUMLAH</b>		20	1		1	40

**1.1 Daftar Pegawai Kecamatan Trenggalek Tahun 2023**

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
1	Drs. Kiki Wahyu Rezeki	IV/b	Camat	S1
2	Iwan Sigit Badawi, S.Pt	IV/a	Sekretaris Kecamatan	S1
3	Sholeh Wahyuni, S.Sos	III/b	Kasi Kesejahteraan Rakyat	S1
4	Mursidi, S.Sos	III/d	Kasi Tata Pemerintahan	S1
5	Slamet Santoso, S.Sos	III/d	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	S1
6	Agus Widodo, ST	III/d	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	S1

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
7	Kusmiati,S.Sos	III/d	Kasubbag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	S1
8	Dwi Utami Astuti, SE	III/d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1
9	Sri Wahyuni	III/a	Pengelola Keuangan	SMA
10	Arie Setiawan	II/d	Pengelola bahan perencanaan	SMA
11	Ahmad Sutiono	II/d	Pengadministrasi Umum	SMA
12	Sri Winarti,SE	III/d	Lurah Surodakan	S1
13	Dwi Hariyani,SE	III/d	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Surodakan	S1
14	Wiwik Dwi Nurcahyani	III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan Surodakan	SMA
15	Heru Purwanto	II/d	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Surodakan	SMA
16	Susianik	II/c	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Surodakan	SMA
17	Suhardaya	II/b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Surodakan	SMP
18	Reny Widya K,S,STP,MSi.	III/d	Lurah Sumbergedong	S2
19	Agus Marchaban, SH	III/d	Sekretaris Kelurahan Sumbergedong	S1
20	Sukarmadi, S.Sos	III/d	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Sumbergedong	S1
21	Sumiatiningsih	III/a	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Sumbergedong	SMA
22	Supriyono	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Sumbergedong	SMA
23	Bambang Wusprpto,SH	III/c	Lurah Ngantru	S1
24	Didik Supriyanto	III/c	Sekretaris Kelurahan Ngantru	SMA
25	Tanto Asmiardi	III/c	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Ngantru	SMA

No.	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan	Pend.
26	Ririn Widiastuti,SE	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan Ngantru	S1
27	Rida Sulistiyani	III/b	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Ngantru	S1
28	Tarmuji	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Ngantru	SMA
29	Suhendrik Wahyu Distiawan	II/d	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Ngantru	SMA
30	Wardi,SE	III/d	Lurah Tamanan	S1
31	Tutik Sri Marhandayani, S.Sos.	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kel Tamanan	S1
32	Muhammad Iqbal S, S.STP	III/b	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Tamanan	D.IV
33	Tutik Sariyani	III/a	Pengadministrasi Umum pada Kelurahan Tamanan	SMA
34	Teguh Sih Budiwiyono	III/a	Pengadministrasi Kependudukan pada Kelurahan Tamanan	SMA
35	Ahmad Yani	II/d	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Tamanan	SMA
36	Pamuji Rochmad	III/d	Lurah Kelutan	SMA
37	Muasri, SE	III/d	Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat pada Kelurahan Kelutan	S1
38	Sunarto	III/b	Plt.Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dan Pelayanan Umum pada Kelurahan Kelutan	SMA
39	Suharyono	III/b	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana pada Kelurahan	S1
40	Haryanto	II/d	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Kelutan	SMA

Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Trenggalek 2023

## 1.5. ISU STRATEGIS

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan agar dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor- faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor- faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan-permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap bagian atau seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui penilaian terhadap capaian kinerja. Disamping itu akan diuraikan pula untuk mengetahui faktor- faktor (*internal maupun eksternal*) yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Berdasarkan pada gambaran layanan Kecamatan Trenggalek, serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka berikut ini disajikan identifikasi permasalahan-permasalahan (**ISU STRATEGIS**) yang terdapat di wilayah Kecamatan Trenggalek, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Penyelenggraan Reformasi Birokrasi di Kecamatan
3. Fasilitasi peningkatan/ pemulihan perekonomian masyarakat melalui BUMDesa, Bumdesma dan UMKM
4. Penyelenggaraan pelayanan prima dalam mewujudkan pemerintahan kecamatan yang baik
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penanganan konflik dengan humanis yang ada di wilayah
6. Peningkatan Koordinasi melalui Penguatan Kecamatan sebagai rumah bersama bagi tenaga pendamping/teknis/penyuluh di Kecamatan, juga untuk penguatan sistem sinergitas kecamatan dalam pemberian layanan umum melalui “ **Inovasi Angkringan Mama Syantika**” (Rumah Bersama ), fasilitasi anak berkebutuhan khusus dan percepatan desa / kecamatan layak anak.

**Tabel 1.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Trenggalek**

		Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan PD)	Aspek Kajian	
Kesekretariatan (issue Strategis ke 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agenda surat masuk/keluar.</li> <li>b. Administrasi Kepegawaian, yaitu buku harian PNS.</li> <li>c. Inventarisasi asset kantor.</li> <li>d. Pemeliharaan kantor.</li> <li>e. Renstra.</li> <li>f. Renja.</li> <li>g. RKA/DPA.</li> <li>h. Laporan Terpadu.</li> <li>i. LAKIP</li> </ul> </li> <li>- Telah terlaksana :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perbendaharaan keuangan PD.</li> <li>b. pendistribusian anggaran kegiatan.</li> <li>c. Laporan SPJ kegiatan.</li> <li>d. Laporan Realisasi Keuangan</li> </ul> </li> </ul>	Peraturan perundang-undangan terkait : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepegawaian.</li> <li>b. asset.</li> <li>c. Renstra, Renja dan LAKIP/LAPKIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Ketersediaan anggaran.</li> <li>c. Ketersediaan sarpras.</li> </ul>		
Pemerintahan dan Pelayanan Umum. (issue strategis ke 1 dan 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah terlaksana :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan administrasi Desa.</li> <li>b. Laporan /pemukhiran data kependudukan</li> <li>c. Pembinaan aparatur Desa.</li> <li>d. Monitoring penyusunan APBDesa.</li> <li>e. Monitoring ADD.</li> <li>f. Pengolahan RKPDesa, LKPD dan LPPD Desa.</li> <li>g. Pembinaan penyelenggaraan Pemdes.</li> <li>h. Fasilitasi Pelayanan Masyarakat</li> <li>i. Program Kecamatan sebagai Rumah Bersama melalui Inovasi “Angkringan Mama Syantika”</li> </ul> </li> </ul>	Peraturan Perundang-undangan di bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintahan Desa.</li> <li>b. Kependudukan</li> <li>c. Pelayanan Umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Ketersediaan anggaran.</li> <li>c. Jadwal pertemuan dengan tenaga Pendamping/Teknis/ Penyuluh Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesiapan Pemdes.</li> <li>b. Koordinasi dengan Dispendukcapil</li> <li>c. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan identitas diri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Keterbatasan anggaran.</li> <li>c. Kesiapan Pemdes.</li> <li>d. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan identitas diri.</li> </ul>

<p>Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial. (Issue Strategis ke 3 dan 6)</p>	<p>Telah terlaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan. PraMusrenbang dan Musrena keren</li> <li>b. Pembinaan PKK ke desa</li> <li>c. Kerjasama Lintas Serktoral, KB dan Puskesmas</li> <li>d. Pendampingan masyarakat penyandang masalah social, penerima bantuan</li> <li>e. Pembinaan Koperasi, Bumdes, Bumdesma dan UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi</li> <li>f. Pembinaan karang taruna/pemuda dan lansia.</li> <li>g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>	<p>Peraturan perundang-undangan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penyandang masalah social, penerima Bantuan</li> <li>b. Pembinaan pemuda dan Lansia.</li> <li>c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Ketersediaan anggaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sama dengan Dinkes, Dinas Komindag Bagian Kesra Setda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Keterbatasan anggaran.</li> <li>c. Keterbatasan sarpras.</li> <li>d. kurang diakomodirnya kepentingan kaum marjinal.</li> </ul>
<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum. (Issue Strategis ke 5)</p>	<p>Telah terlaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan dan pengendalian trantibum kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.</li> <li>b. Pendataan dan pembinaan Linmas.</li> <li>c. Pemantauan dan pengendalian lingkungan dan gotong royong masyarakat.</li> </ul>	<p>Peraturan perundang-undangan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kependudukan.</li> <li>b. Lingkungan hidup.</li> <li>c. Trantibum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Ketersediaan anggaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesadaran masyarakat terhadap trantibum.</li> <li>b. Potensi rawan bencana alam dan bencana sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Keterbatasan anggaran.</li> <li>c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara trantibum.</li> <li>d. Lokasi potensi rawan bencana alam dan bencana sosial</li> </ul>

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 adalah:

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif**
- **Daftar Isi**

- **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- **BAB II      Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- **BAB III     Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;



6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran :**

- a. Matriks Renstra 2021 - 2026
- b. SK TIM Penyusunan LKjIP Tahun 2023
- c. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2023
- d. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- e. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2023

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja berpedoman pada rencana strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam mencapai tujuan. Dalam rencana strategis hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi penetapan visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan

#### **2.1 VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka waktu menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Trenggalek MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH MUHAMAD NATANEGARA yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi  
Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan  
(Sustainable Development)”**

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

- **MAJU**

Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktifitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

- **EKONOMI INKLUSIF**

Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

- **SDM KREATIF**

SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

- **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Dalam mewujudkan visi maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren.
2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;

3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar); dan
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Dari Ke-Empat Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Kecamatan Trenggalek sebagai Perangkat Daerah adalah mendukung Misi yang ketiga yaitu : ***Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam rangka Memastikan Pelayanan Prima khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan berbasis Big Data (Satu Data Besar).***

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Trenggalek merupakan dokumen pelaporan kinerja pemerintah dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan yang dilaksanakan sebagai evaluasi dan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TRENGGALEK**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing- masing misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat

spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut indikator haruslah ***specific measurable achievable relevant dan time band***.

Perumusan tujuan dan sasaran pada perangkat daerah Kecamatan Trenggalek mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, dimana dapat dirumuskan tujuan, sasaran beserta indikatornya untuk di Kecamatan Trenggalek dapat disajikan pada table berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran pada Renstra Kecamatan Trenggalek**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah						
		Indikator	Target Th. 2021	Target Th. 2022	Target Th. 2023	Target Th. 2024	Target Th. 2025	Target Th. 2026
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien	Nilai RB Perangkat Daerah	80	81	82	83	84	85
		Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	80 (A)	82 (A)	84,5 (A)	87 (A)	90 (AA)	90 (AA)
Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Meningkatnya layanan publik kolaboratif	Indeks Sinergitas Kecamatan	75	76	77	78	79	80
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	92	93

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Penetapan indikator Kinerja Utama di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Kategori Nilai SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	Inspektorat	CAMAT
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey	CAMAT

## 2.4 RENCANA KERJA KECAMATAN TRENGGALEK TAHUN 2023

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pada Instansi Kecamatan Trenggalek untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana kerja tahunan kecamatan sebagai perangkat daerah. RENJA merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek, serta selaras dengan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Kerja Kecamatan Trenggalek Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Kecamatan Trenggalek periode 2021-2026.

Didalam RENJA terdapat program dan kegiatan, dimana program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jadi program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana kegiatan.

Program kerja Kecamatan Trenggalek merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023 Kecamatan Trenggalek memiliki 5 (lima) program. Adapun program Kecamatan Trenggalek yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari program yang telah disebutkan diatas maka dijabarkan kembali ke dalam kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Kegiatan atau aktifitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat. Kegiatan juga merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan mempunyai cakupan waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Kantor Kecamatan Trenggalek sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **2.5 PERJANJIAN KINERJA**

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah Perjanjian Kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :



**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,5 (A)
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.436.666.698,-	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 168.128.730,-	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.351.417.508,-	APBD
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 232.081.500,-	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 52.080.000,-	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 9.240.374.436,-</b>	

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,5 (A)
2.	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.819.321.330,-	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 174.128.730,-	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.695.456.608,-	APBD
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 218.911.500,-	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 58.480.000,-	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 8.966.298.168,-</b>	

Perjanjian Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk peningkatan kinerja dengan perjanjian target-target pencapaian yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian kinerja Kecamatan Trenggalek untuk tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) sasaran, 2 (dua) indikator capaian dengan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang mengampu anggaran untuk pelaksanaan Kinerja selama 1 (satu) tahun. Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam **Lampiran**.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-rata % Capaian
1.	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2.	Baik	$X = 100$
3.	Cukup	$80 < X < 100$
4.	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5.	Sangat Kurang	$X < 50$

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja disini merupakan capaian kinerja organisasi yang setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Trenggalek Tahun 2023**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50 (A)	83,53 (A)	99%	Baik	LHE SAKIP dari Inspektorat
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	99,49	110%	Sangat Baik	Survey Kepuasan Masyarakat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk tahun 2023 untuk indikator kinerja Utama Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dikategorikan **Baik** sedangkan untuk untuk indikator kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dikategorikan **Sangat Baik** dikarenakan mencapai lebih dari 100%.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 hampir tercapai secara keseluruhan namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	80,00 (A)	80,30 (A)	100%	82,00 (A)	82,85 (A)	101%	84,50 (A)	83,53 (A)	99%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	92,15	102%	90	90,50	100%	90	99,49	110%
<b>Capaian rata-rata nilai IKU</b>					<b>101,00%</b>			<b>100,50%</b>			<b>104,50%</b>

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,53 (A)	84,50 (A)	99%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,49	90	110%

Berdasarkan table 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Realisasi 83,53 (A) jika dibandingkan dengan akhir Renstra 90 (AA) mengalami kemajuan senilai 93%, sehingga untuk tahun berikutnya dibutuhkan nilai 6,5% untuk mencapai target akhir Renstra dan untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dengan Realisasi 99,49 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 92 maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target akhir Renstra.

### 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.5

#### Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	83,53 (A)	72,05	116%
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,49	-	-

Berdasarkan table 3.5 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek untuk indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Realisasi 83,53 (A) jika dibandingkan dengan nilai realisasi nasional 72,05 (BB) maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target nasional.

### 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan Kecamatan Trenggalek pada Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik namun realisasi anggaran tidak bisa terserap secara maksimal di kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena berkurangnya pegawai pada eselon 4 dan staf, tetapi untuk realisasi kinerja terealisasi secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari Realisasi Anggaran sebesar Rp.8.011.034.770,00 dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp.8.966.298.168,00 atau Realisasi sebesar 89,35%, dengan Capaian Kinerja sebesar 95,75%.

Dengan demikian Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan tidak diuraikan lebih dalam karena tidak ada permasalahan serius yang dihadapi Kecamatan Trenggalek dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Penjelasan lebih rinci sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN																		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	84,50	83,53	99%	<p>Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah sebesar 83,53 (A), dari target nilai 84,50 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya hasil komponen penilaian diuraikan dalam tabel berikut ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Bobot</th> <th>Persentase Nilai Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> <td>28,93%</td> </tr> <tr> <td>b. Pengukuran Kinerja</td> <td>30%</td> <td>25,11%</td> </tr> <tr> <td>c. Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> <td>12,05%</td> </tr> <tr> <td>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>25%</td> <td>17,44%</td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>83,53%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Penyebab meningkatnya nilai SAKIP</p>	Komponen	Bobot	Persentase Nilai Capaian	a. Perencanaan Kinerja	30%	28,93%	b. Pengukuran Kinerja	30%	25,11%	c. Pelaporan Kinerja	15%	12,05%	d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,44%	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>83,53%</b>	-
Komponen	Bobot	Persentase Nilai Capaian																							
a. Perencanaan Kinerja	30%	28,93%																							
b. Pengukuran Kinerja	30%	25,11%																							
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,05%																							
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,44%																							
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>83,53%</b>																							



						Kecamatan Trenggalek pada tahun 2023 tidak lain karena adanya komitmen pimpinan terkait dengan pentingnya implementasi saking dilingkungan kecamatan, serta kepedulian seluruh pegawai akan pentingnya akuntabilitas kinerja.	
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	99,49	110%	Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 antara target dengan realisasi mengalami peningkatan ini bisa dilihat dari target 90 dengan realisasi yang dicapai adalah 99,49 atau dengan capaian 110%. Ketercapaian indikator ini tidak lain dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang baik di intern Kecamatan yang mempunyai komitmen yang sama yaitu pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Trenggalek mendapat predikat Sangat baik.	-

### **3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Trenggalek didukung sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang terbatas. Dari sisi jumlah, cukup tersedia sumberdaya aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Trenggalek dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian perlu adanya peningkatan kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak didukung kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait keterbatasan sarana dan prasarana, Kecamatan Trenggalek telah merealisasikan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah Rp.70.000.000,00 dengan realisasi Rp.68.760.000,00 atau dengan persentase 98,10%

Pada tahun anggaran 2023, program dan kegiatan pada Kecamatan Trenggalek dapat berjalan dengan baik antara lain disebabkan adanya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya utamanya Sumberdaya Aparatur. Dengan keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Trenggalek, maka terdapat beberapa tugas jabatan yang dilaksanakan oleh Pejabat struktural dan staf/fungsional umum yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan pada Sub Bagian/Seksi lainnya. Sekalipun pada akhirnya capaian kinerja berhasil diraih sesuai target, pembebanan tugas yang tidak seimbang mengakibatkan iklim kerja yang kurang kondusif.

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Nilai Efisiensi	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	84,50	83,53	99%	6.819.321.330	6.085.990.749	89,24%	101%	Efisien
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	90	99,49	110%	2.146.976.838	1.925.044.021	89,66%	110%	Efisien

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Nilai Efisiensi	Tingkat Efisiensi
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>8,966,298,168</b>	<b>8.011.034.770</b>	<b>89,35</b>		
<b>KECAMATAN TRENGGALEK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,375,918,478</b>	<b>5,770,659,099</b>	<b>90,53</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>6,076,193,748</b>	<b>5,382.485.358</b>	<b>90,26</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37	37	100	15.500.000	14,194,900	91,58	1,10	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	5,787,614,348	5,206,052,154	89,95	1,10	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	14,000,000	12,903,750	92,17	1,10	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	64,759,400	63,518,827	98,08	1,10	Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	70.000.000	68.760.000	98,23	1,10	Efisien

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	104,570,000	101,402,914	96,97	1,10	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,93	100	18,750,000	16,749,500	89,33	1,00	Impas
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>174,128,730</b>	<b>166,500,250</b>	<b>95,62</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	100	26,437,000	26,215,000	99,16	1,10	Efisien
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3	3	100	147,691,730	140,285,250	94,98	1,10	Efisien
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12,116,000</b>	<b>11,523,000</b>	<b>95,10</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	1	100	12,116,000	11,523,000	95,10	1,10	Efisien
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>55,000,000</b>	<b>54,242,900</b>	<b>98,62</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	12	100	55,000,000	54,242,900	98,62	1,10	Efisien
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>58,480,000</b>	<b>55,674,200</b>	<b>95,20</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	12	100	58,480,000	55,674,200	95,20	1,10	Efisien
<b>KELURAHAN SURODAKAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>490,850,500</b>	<b>464,822,354</b>	<b>94,70</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>134,833,182</b>	<b>123,989,104</b>	<b>91,96</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	29,040,000	23,790,000	81,92	1,10	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	12,103,182	11,894,700	98,28	1,10	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	82,440,000	78,516,404	95,24	1,10	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	11,250,000	9,788,000	87,00	1,10	Efisien

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>329,857,818</b>	<b>321,848,250</b>	<b>97,57</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2	2	100	329,857,818	321,848,250	97,57	1,10	Efisien
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>26,159,500</b>	<b>18,985,000</b>	<b>72,57</b>	<b>1,00</b>	<b>Impas</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	11	91	26,159,500	18,985,000	72,57	1,00	Impas
<b>KELURAHAN SUMBERGEDONG</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>553,384,550</b>	<b>543,640,415</b>	<b>98,24</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>211,430,500</b>	<b>203,467,315</b>	<b>96,23</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	29,440,000	25,890,000	87,94	1,10	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	15,691,000	14,585,950	92,95	1,10	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	105,230,000	103,329,465	98,19	1,10	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	61,069,500	59,661,900	97,69	1,10	Efisien
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>312,464,550</b>	<b>310,849,100</b>	<b>99,48</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2	2	100	312,464,550	310,849,100	99,48	1,10	Efisien
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>29,489,500</b>	<b>29,324,000</b>	<b>99,44</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	100	29,489,500	29,324,000	99,44	1,10	Efisien
<b>KELURAHAN NGANTRU</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>586,287,600</b>	<b>301,296,861</b>	<b>51,39</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>146,420,400</b>	<b>138,100,881</b>	<b>94,32</b>	<b>1,00</b>	<b>Impas</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	29,040,000	29,040,000	100,00	1,10	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,5	100	13,972,000	12,685,025	90,78	1,00	Impas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	90,158,400	84,904,356	94,17	1,10	Efisien

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96,67	100	13,250,000	11,471,500	86,58	1,00	Impas
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>68,33</b>	<b>70</b>	<b>401,707,700</b>	<b>130,293,780</b>	<b>32,43</b>	<b>0,70</b>	<b>Tidak Efisien</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2	1	50	401,707,700	130,293,780	32,43	0,50	Tidak Efisien
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>38,159,500</b>	<b>32,902,200</b>	<b>86,22</b>	<b>1,00</b>	<b>Impas</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	11	100	38,159,500	32,902,200	86,22	1,00	Impas
<b>KELURAHAN TAMANAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>490,081,250</b>	<b>468,412,080</b>	<b>95,57</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>122,562,000</b>	<b>113,067,980</b>	<b>92,25</b>	1,00	Impas
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	28,140,000	28,140,000	100,00	1,10	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	90,5	95	24,390,500	21,603,700	88,57	1,00	Impas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	47,950,000	43,692,280	91,12	1,10	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,67	100	22,081,500	19,632,000	88,91	1,00	Impas
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>329,359,750</b>	<b>322,529,600</b>	<b>97,93</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2	2	100	329,359,750	322,529,600	97,93	1,10	Efisien
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38,159,500</b>	<b>32,814,500</b>	<b>85,99</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	100	38,159,500	32,814,500	85,99	1,10	Efisien

<b>KELURAHAN KELUTAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>469,775,790</b>	<b>462,203,961</b>	<b>98,37</b>		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>127,881,500</b>	<b>124,880,111</b>	<b>97,65</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	29,040,000	28,440,000	97,93	1,10	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	17,718,200	16,602,979	93,70	1,10	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	66,721,800	65,866,132	98,72	1,10	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	14,401,500	13,971,000	97,00	1,10	Efisien
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>309,950,790</b>	<b>306,883,600</b>	<b>99,00</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2	2	100	309,950,790	306,883,600	99,00	1,10	Efisien
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>31,943,500</b>	<b>30,440,250</b>	<b>95,29</b>	<b>1,10</b>	<b>Efisien</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	12	100	31,943,500	30,440,250	95,29	1,10	Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi diatas, terdapat 4 program yang memiliki nilai efisiensi diatas atau lebih dari 1 yaitu, program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan begitu keempat program tersebut dapat dikatakan efisien dari segi perbandingan antara kinerja dan anggaran. Namun, terdapat 1 program yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 yaitu, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimana program ini dikatakan impas karena menggunakan seluruh kemampuan anggaran pada program ini dalam rangka mencapai target kinerja, sehingga didapatkan angka efisiensi sama dengan 1 yang diartikan impas atau dengan kata lain tidak bisa dikatakan efisien dan juga tidak bisa dikatakan tidak efisien.

### **3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan merupakan sarana bagi organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima, yaitu dengan kata lain merupakan informasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan amanahnya.

Dalam analisis ini dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dari masing-masing pejabat struktural maupun fungsional yang telah dibuat sesuai pendukung program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun analisis terhadap program/kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Trenggalek Tahun Anggaran 2023 dapat diketahui dalam Laporan Kinerja yang telah disusun masing-masing pelaksana program/kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja dilihat dari perjanjian kinerja Kecamatan Trenggalek pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Kecamatan Trenggalek sebagaimana pada table di bawah ini:



**Tabel 3.9**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	105,28%	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,67%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	105,56%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	Menunjang				

2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	110%	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	100%	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	80%	Tidak Menunjang Ada 1 kelurahan yang tidak melaksanakan pembangunan Sarpras terkendala asanya sebagian rek.belanja tidak sesuai dengan RAB
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	100%	Menunjang
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang				

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trenggalek TA 2023**

NO	Indikator Kinerja Utama	2023			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai (Kategori nilai) SAKIP	Nilai	84,50 (A)	83,53 (A)	99%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,00	99,49	110%
<b>Capaian rata-rata nilai IKU</b>					<b>104,5%</b>

#### A. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR NILAI (KATEGORI NILAI) SAKIP

Indikator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP adalah sebesar 83,53 (A), dari target nilai 84,50 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya hasil komponen penilaian diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Indikator Nilai SAKIP**

Komponen	Bobot	Persentase Nilai Capaian
a. Perencanaan Kinerja	30%	28,93%
b. Pengukuran Kinerja	30%	25,11%
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,05%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	27,44%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>83,53%</b>

**B. ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM).**

Nilai IKM adalah sebesar 99,49 (A), dari target nilai 90,00 (A) yang direncanakan di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 110%. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari skor layanan yang ada di Kecamatan Trenggalek menggunakan aplikasi <https://skm.trenggalekkab.go.id/> yang dapat diakses semua masyarakat dalam penilaian pelayanan terhadap Kecamatan Trenggalek.

**Tabel 3.12**  
**Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

No	Layanan	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Skor Layanan	Keterangan
1	PELAYANAN KEPEGAWAIAN ASN	63	6233,33	98,94	Sangat Baik (A)
2	PELAYANAN ADMINDUK DAN CATATAN SIPIL	48	4752,78	99,02	Sangat Baik (A)
3	PELAYANAN APLIKASI, DOKUMENTASI DAN INFORMATIKA	16	1594,44	99,65	Sangat Baik (A)
4	PELAYANAN PENGADUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95	9469,45	99,68	Sangat Baik (A)
5	PELAYANAN UMUM	520	48288,87	99,16	Sangat Baik (A)
6	FASILITASI IJIN MELALUI OSS	16	1600	100	Sangat Baik (A)
7	BINWAS PEMERINTAHAN DESA	14	1400	100	Sangat Baik (A)
8	PELAYANAN PERIJINAN KERAMAIAAN, HAJATAN	68	6738,89	99,1	Sangat Baik (A)

9	PELAYANAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT	13	1275	98,08	Sangat Baik (A)
10	PELAYANAN KEGIATAN FASILITASI SOSBUD DAN KEAGAMAAN	13	1300	100	Sangat Baik (A)
11	FASILITASI KEGITAN KESRA	20	2000	100	Sangat Baik (A)
12	PELAYANAN FASILITASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	57	5700	100	Sangat Baik (A)
13	PELAYANAN REGISTRASI PROPOSAL, PELAPORAN/PENGAJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	87	5686,11	99,76	Sangat Baik (A)
<b>JUMLAH</b>		<b>1030</b>	<b>102474,70</b>	<b>99,49</b>	<b>Sangat Baik (A)</b>

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Ikhtisar realisasi target kinerja keuangan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2023, sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran Belanja Kecamatan Trenggalek Tahun Anggaran 2023 adalah sejumlah Rp.8.966.298.168,00 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.8.011.034.770,00 atau 89,35% dari anggaran yang meliputi 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 101 (seratus satu) Sub Kegiatan. Sedangkan dilihat dari masing- masing kegiatan sebagian besar pencapaian di atas 90% sehingga secara keseluruhan telah mencapai target, yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11**  
**Tabel Realisasi Anggaran tahun 2023**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi	Capaian %
<b>KECAMATAN TRENGGALEK</b>	<b>8.966.298.166</b>	<b>8.011.034.770</b>	<b>89,35</b>
<b>KECAMATAN TRENGGALEK</b>	<b>6,375,918,478</b>	<b>5,770,659,099</b>	<b>90,53</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,076,193,748</b>	<b>5,382.485.358</b>	<b>90,26</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000	14,194,900	91,58
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,787,614,348	5,206,052,154	89,95

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14,000,000	12,903,750	92,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	64,759,400	63,518,827	98,08
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000	68.760.000	98,23
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104,570,000	101,402,914	96,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,750,000	16,749,500	89,33
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>174,128,730</b>	<b>166,500,250</b>	<b>95,62</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26,437,000	26,215,000	99,16
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	147,691,730	140,285,250	94,98
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>12,116,000</b>	<b>11,523,000</b>	<b>95,10</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12,116,000	11,523,000	95,10
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>55,000,000</b>	<b>54,242,900</b>	<b>98,62</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55,000,000	54,242,900	98,62
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>58,480,000</b>	<b>55,674,200</b>	<b>95,20</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58,480,000	55,674,200	95,20
<b>KELURAHAN SURODAKAN</b>	<b>490,850,500</b>	<b>464,822,354</b>	<b>94,70</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>134,833,182</b>	<b>123,989,104</b>	<b>91,96</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,040,000	23,790,000	81,92
Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,103,182	11,894,700	98,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,440,000	78,516,404	95,24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,250,000	9,788,000	87
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>329,857,818</b>	<b>321,848,250</b>	<b>97,57</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	329,857,818	321,848,250	97,57

<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>26,159,500</b>	<b>18,985,000</b>	<b>72,57</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	26,159,500	18,985,000	72,57
<b>KELURAHAN SUMBERGEDONG</b>	<b>553,384,550</b>	<b>543,640,415</b>	<b>98,24</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>211,430,500</b>	<b>203,467,315</b>	<b>96,23</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,440,000	25,890,000	87,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15,691,000	14,585,950	92,95
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,230,000	103,329,465	98,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61,069,500	59,661,900	97,69
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>312,464,550</b>	<b>310,849,100</b>	<b>99,48</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	312,464,550	310,849,100	99,48
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>29,489,500</b>	<b>29,324,000</b>	<b>99,44</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29,489,500	29,324,000	99,44
<b>KELURAHAN NGANTRU</b>	<b>586,287,600</b>	<b>301,296,861</b>	<b>51,39</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>146,420,400</b>	<b>138,100,881</b>	<b>94,32</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,040,000	29,040,000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,972,000	12,685,025	90,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,158,400	84,904,356	94,17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,250,000	11,471,500	86,58
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>401,707,700</b>	<b>130,293,780</b>	<b>32,43</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	401,707,700	130,293,780	32,43
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>38,159,500</b>	<b>32,902,200</b>	<b>86,22</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	38,159,500	32,902,200	86,22
<b>KELURAHAN TAMANAN</b>	<b>490,081,250</b>	<b>468,412,080</b>	<b>95,57</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>122,562,000</b>	<b>113,067,980</b>	<b>92,25</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,140,000	28,140,000	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah	24,390,500	21,603,700	88,57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,950,000	43,692,280	91,12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,081,500	19,632,000	88,91
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>329,359,750</b>	<b>322,529,600</b>	<b>97,93</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	329,359,750	322,529,600	97,93
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>38,159,500</b>	<b>32,814,500</b>	<b>85,99</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	38,159,500	32,814,500	85,99
<b>KELURAHAN KELUTAN</b>	<b>469,775,790</b>	<b>462,203,961</b>	<b>98,37</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>127,881,500</b>	<b>124,880,111</b>	<b>97,65</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,040,000	28,440,000	97,93
Administrasi Umum Perangkat Daerah	17,718,200	16,602,979	93,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,721,800	65,866,132	98,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14,401,500	13,971,000	97
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>309,950,790</b>	<b>306,883,600</b>	<b>99</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	309,950,790	306,883,600	99
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>31,943,500</b>	<b>30,440,250</b>	<b>95,29</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31,943,500	30,440,250	95,29



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab III dan uraian perencanaan kinerja pada Bab II, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja pada tahun 2023 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian indikator sasaran Kecamatan Trenggalek dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan indicator Nilai (Kategori Nilai) SAKIP mendapatkan Nilai 83,53 dengan predikat A, dengan begitu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 99%.
2. Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif dengan indicator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mendapatkan nilai 99,49, dengan begiatu capaian kinerja untuk sasaran ini adalah 110%.

Dalam upaya mencapai kinerja seperti diatas pagu anggaran Kecamatan Trenggalek anggaran sebesar Rp.8.966.296.168,00 dan dalam upaya tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp.8.011.034.770,00 dengan sisa anggaran Rp.955.263.398,00 untuk tahun anggaran 2023.

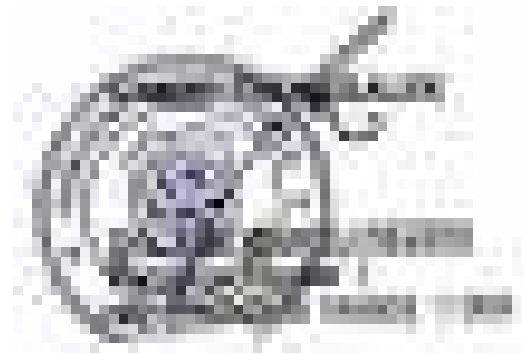
#### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Ada beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerja, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran unsur Pengelola Kegiatan khususnya KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan supaya lebih cermat dan teliti untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.

2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja OPD.
3. Pembinaan integritas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



**FORM I**

**MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TRENGGALEK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

No.	RPJMD			RENSTRA		KETERANGAN
	MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Misi ke-3 :</b> Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif, Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)	<b>Tujuan 3.1 :</b> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	<b>Sasaran 3.1.1 :</b> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten, profesional, kreatif dan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dan menunjang pelayanan publik yang prima	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di kecamatan sebagaimana yang dilimpahkan Bupati kepada camat yang baik ( <i>good governance</i> ), diperlukan prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang tepat, obyektif dan profesional. Di era sekarang dengan kompleksitas permasalahan dan tuntutan, diperlukan adanya sistem kolaboratif yang solid serta dukungan sistem big data sebagai <i>tool</i> penunjang. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik bisa diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja yang ada.
				Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Meningkatnya layanan publik dan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan secara kolaboratif	Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kecamatan dibentuk selain untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum juga terkait koordinasi pelayanan publik serta koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan (Pasal 221, ayat 1). Untuk implementasi hal tersebut diperlukan kolaborasi antar stakeholder yang ada dan ditunjang suatu sistem big data sebagai alat bantu dalam pemberian layanan yang prima yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat ( <i>citizen friendly</i> ) yang serba cepat, tepat dan terukur. Keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan yang prima bisa diukur dengan indeks kepuasan publik yang ada

FORM II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TRENGGALEK  
KABUPATEN TRENGGALEK

No.	Tujuan RENSTRA	Indikator Tujuan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Tujuan							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Sasaran RENSTRA	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Sasaran							Keterangan
					Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	Th. 2021						Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026			
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	Jumlah nilai evaluasi RB Perangkat Daerah	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	84,00	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	79,13 (BB)	80 (A)	82 (A)	84,5 (A)	87 (A)	90 (AA)	90 (AA)	90 (AA)		
2	Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data	Indeks Sinergitas Kecamatan	Jumlah nilai Indeks Sinergitas Kecamatan	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Jumlah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari hasil survey	96,48	90,00	90,00	90,00	90,00	92,00	93,00	92,00		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Keterangan		
						Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		Target Kinerja	Rp.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	KECAMATAN					11,945,526,067		9,439,439,353			9,439,439,500			9,439,439,500			10,383,386,000		60,086,669,920	
17.01.000.000.01.000.0	RECAMATAN TRENGGALEK					80,00		82,00			83,00			84,00			85,00		84,00	
						80 (A)		82 (A)			83 (A)			84 (AA)			85 (AA)		84 (AA)	
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan	%	100	100%	7,275,888,167	100%	7,524,925,165	100	7,930,797,700	100	7,930,797,700	100	7,930,797,700	100	8,723,878,000	100%	47,947,106,432	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	(Σ rupiah aset dalam kondisi baik/jumlah rupiah total aset) x 100%	%	100	100%	202,649,500	100%	384,372,500	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Σ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (Σ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah) x 100%	%	97.81	97.85%	21,500,000	97.87%	21,500,000	97.90	97.92	97.95	97.95	97.95	97.95	97.95	97.95	97.95%	97.95%	
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	37	37	21,500,000	37	21,500,000	37	21,500,000	37	21,500,000	37	21,500,000	37	22,575,000	37	130,075,000	
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)		7 Dokumen	7	21,500,000	7	11,500,000									7	33,000,000	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							7	11,500,000	7	11,500,000	7	11,500,000	7	11,500,000	7	11,500,000	7	46,000,000
x.xx.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	30	30	10,000,000	30	10,000,000									30	10,000,000	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Laporan	30	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	11,075,000	30	41,075,000	
x.xx.01.2.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi keuangan pada masing-masing kegiatan	%	100	100%	7,031,948,167	100%	7,279,667,253		6,904,727,288		6,904,727,288		6,904,727,288		7,271,980,116	100	42,297,777,400	
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	(Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan) / (Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN keseluruhan 1 tahun)	%	100	100%	6,491,258,167	100%	6,706,527,253									100%	13,197,785,420	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Orang/Bulan	53	53	6,706,527,288	53	6,706,527,288	53	6,706,527,288	53	6,706,527,288	53	6,706,527,288	53	7,031,780,116	53	27,151,361,980	
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan yang disusun (buah/ dokumen)	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan yang disusun (buah/ dokumen)		12	12	548,690,000	12	573,140,000									12	1,113,830,000	
		Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan yang disusun (buah/ dokumen)	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN Kecamatan yang disusun (buah/ dokumen)	Dokumen	12	12	195,200,000	12	195,200,000	12	195,200,000	12	195,200,000	12	195,200,000	12	235,200,000	12	820,800,000	
x.xx.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Buah/Dokumen)	Dokumen	227	227	1,800,000	227	1,800,000	227	1,800,000	227	1,800,000	227	1,800,000	227	2,000,000	227	5,000,000	

k.kk.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Laporan		44			44	2,000,000	44	2,000,000	44	2,000,000	44	3,000,000	44	9,000,000		
k.kk.01.2.03.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	%		100			100	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	4,000,000	100%	10,000,000		
k.kk.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan		8			8	2,000,000	8	2,000,000	8	2,000,000	8	4,000,000	8	10,000,000		
k.kk.01.2.05.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah pada masing-	%		100	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100	27,000,000	100%	27,000,000	100%	26,250,000	100%	161,250,000		
k.kk.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (paket)	Paket		1			1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000		
k.kk.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen		43			43	1,000,000	43	1,000,000	43	1,000,000	43	1,000,000	43	2,000,000		
k.kk.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah personel yang mengikuti diklat (orang)	Jumlah personel yang mengikuti diklat (orang)	orang		10	19	27,000,000	19	27,000,000	19	25,000,000	19	25,000,000	19	25,000,000	19	24,250,000	19	153,250,000
k.kk.01.2.06.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi umum pada masing-masing sub kegiatan	%		100	100%	216,940,000	100%	152,327,912	100	147,038,100	100%	147,038,100	100%	326,512,200	100%	1,136,894,412		
k.kk.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (buah)	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan (buah)	unit		10	1		1	6,217,000							1	6,217,000		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket		1			1	6,217,000	1	6,217,000	1	6,217,000	1	44,870,000	1	63,521,000		
k.kk.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Kecamatan yang diadakan (unit)	Jumlah Bahan Logistik Kantor Kecamatan yang diadakan (unit)	unit		520	520	216,940,000	72	146,110,912					520 unit			363,050,912		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket		10			10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	20,000,000	10	50,000,000		
k.kk.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket		10			10	17,500,000	10	17,500,000	10	17,500,000	10	35,000,000	10	87,500,000		
k.kk.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket		6			6	81,710,200	6	81,710,200	6	81,710,200	6	163,420,400	6	408,551,000		
k.kk.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan		6			6	30,610,900	6	30,610,900	6	30,610,900	6	60,221,800	6	152,054,500		
k.kk.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Dokumen		1			1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	1	6,000,000		
k.kk.01.2.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target pengadaan BMD pada masing-masing sub kegiatan	%		100	100%	50,000,000	100%	250,000,000	100	250,000,000	100%	250,000,000	100%	305,000,000	100%	1,355,000,000		
k.kk.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (unit)	Unit		6	1		6	150,000,000					7 Unit			150,000,000	Operasional Struktural Kecamatan dan Lurah	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6			6	150,000,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	200,000,000	6	650,000,000		
k.kk.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (unit)	Unit		12	12	50,000,000	12	100,000,000					12			150,000,000		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12			12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	105,000,000	12	405,000,000		

Kode	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis administrasi umum pada masing-masing sub kegiatan	%	100	100%	-	100%	65,930,000	100%	444,159,812	100%	444,159,812	100%	444,159,812	100%	528,741,884	100%	1,927,151,320
k.xx.01.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Daya Listrik Kantor yang dicukupi (Kwh)	Jumlah Daya Listrik Kantor yang dicukupi (Kwh)	Kwh	16,500	16,500 Kwh	-	16,500 Kwh	26,330,000								16,500 Kwh		26,330,000
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah )	Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah )	N/A	N/A	Rupiah	-	Rupiah	36,000,000								Rupiah		36,000,000
		Jumlah Jasa Telepon kantor yang dicukupi (Rupiah)	Jumlah Jasa Telepon kantor yang dicukupi (Rupiah)	Rupiah	488,000	488,000 Rupiah	-	488,000 Rupiah	3,600,000								488,000 Rupiah		3,600,000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ( 4 x 12 Bulan)	Laporan	48		-		65,930,000	48			65,930,000	48			80,000,000	48	277,790,000
k.xx.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Bulan/Laporan)	Laporan	12		-		378,229,812	13			378,229,812	13			448,741,884	13	1,583,431,320
k.xx.01.2.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	rata-rata capaian realisasi terhadap target pemeliharaan BMD pada masing-masing sub kegiatan	%	100	100	152,649,500	100	134,372,500	100%	134,372,500	100%	134,372,500	100%	134,372,500	100%	238,018,000	100%	928,958,300
k.xx.01.2.01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharannya (kali)	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang difasilitasi jasa pemeliharannya (kali)	Kali	6	6	10,000,000	6	10,000,000								6 Kali		20,000,000
k.xx.01.2.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (kali)	Kali	12	12	2,500,000	12	2,500,000								12 Kali		5,000,000
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (Unit)	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dilaksanakan (Unit)		12 Unit				12,500,000	12			12,500,000	12			19,216,200	12	56,716,200
k.xx.01.2.01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dilaksanakan (kali)	Jumlah pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dilaksanakan (kali)		2 Kali	2		2	1,000,000								2 Kali		1,000,000
		Jumlah pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dilaksanakan (buah)	Jumlah pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dilaksanakan (buah)		2 Unit			2	1,000,000	2			1,000,000	2			1,537,300	2	4,537,300
k.xx.01.2.01.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan (kali)		10 Kali	10	2,500,000	10	1,500,000								10 Kali		4,000,000
		Jumlah Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan (unit)	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan (unit)		2 Unit			2	1,500,000	2			1,500,000	2			3,843,200	2	8,343,200
k.xx.01.2.01.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan (kali)		32 Kali	32	42,770,800	32	38,270,800	32							32		81,041,600
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan (unit)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan (unit)		12 Unit			12	38,270,800	12			38,270,800	12			56,527,600	12	171,340,000
k.xx.01.2.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)		1 Kali	1	94,878,700	1	78,601,700								1		173,480,400
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kegiatan)	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kegiatan)		1 Kegiatan			1	78,601,700	1			78,601,700	1 Kegiatan			150,008,000	1	385,813,100
k.xx.01.2.01.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kali)		1 Kali	1		1	2,500,000								1		2,500,000
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kegiatan)	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan (kegiatan)		1 Kegiatan			1	2,500,000	1			2,500,000	1			7,686,500	1	15,186,500

						75,00		76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		80,00	
						90,00		90,00		90,00		90,00		92,00		93,00		92,00	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	rata-rata capaian realisasi terhadap target pada masing-masing kegiatan pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	184,000,000	100	197,437,000	100	197,437,000	100	197,437,000	100%	197,437,000	100%	217,181,000	100%	1,190,929,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun (dokumen)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	Dokumen	1	-	1	13,437,000	1	33,437,000	1	33,437,000	1	33,437,000	1	42,000,000	1	155,748,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan (kali)		1	-	1	3,437,000									1 kegiatan	3,437,000	
		Jumlah event musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Jumlah event musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan (kali)		2	2	10,000,000										2 Event	10,000,000	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (laporan)		2	2	33,437,000	2	33,437,000	2	33,437,000	2	33,437,000	2	42,000,000	2	142,311,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang disusun	Jumlah Laporan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	1	20,000,000	1	20,000,000									1	40,000,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum yang dipelihara (unit)	1 Unit	1	20,000,000	1	20,000,000									1	40,000,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun (dokumen)	Dokumen	3	164,000,000	3	164,000,000	3	164,000,000	3	164,000,000	3	164,000,000	3	175,181,000	3	995,181,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah PTSL yang difasilitasi	Jumlah PTSL yang difasilitasi (dokumen/ sertifikat)	13 desa/kelurahan	13	13,000,000	13	13,000,000									13	26,000,000	
		Jumlah Izin Non Usaha yang diterbitkan/ difasilitasi	Jumlah Izin Non Usaha yang diterbitkan/ difasilitasi (- izin)		3 perizinan	3	20,000,000	3	20,000,000								3	40,000,000	
		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		28 Dokumen	28	33,000,000	28	33,000,000	28	33,000,000	28	33,000,000	28	34,650,000	28	135,650,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan yang difasilitasi (- Kali)		2 kegiatan	2	46,000,000	2	46,000,000								2	92,000,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitas kegiatan UKS yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitas kegiatan UKS yang dilaksanakan (- kali)		1 Kali	1	2,500,000	1	2,500,000								1	5,000,000	
		Jumlah PPES yang difasilitasi penanganannya	Jumlah PPES yang difasilitasi penanganannya (- orang)		3 Orang	3	20,000,000	3	20,000,000								3	40,000,000	
		Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan PKK di kecamatan (- Kali)		12 Kali	12	25,000,000	12	25,000,000								12	50,000,000	
		Jumlah pendampingan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah pendampingan program keluarga harapan (PKH) (- Kali)		1 kali	1	5,000,000	1	5,000,000								1	10,000,000	
		Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga	Jumlah kegiatan pendukung kegiatan seni budaya, pariwisata dan pembinaan pemuda dan olah raga (- Kali)		2 Kali	2	15,000,000	2	15,000,000								2	30,000,000	
		Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat	Jumlah kegiatan yang mendukung program kabupaten/kota sehat (- kali)		1 Kali	1	2,500,000	1	2,500,000								1	5,000,000	



		Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan bencana sosial yang disusun	Jumlah laporan tanggap darurat awal bencana alam dan bencana sosial yang disusun (... Dokumen)		12 dokumen	12	5,000,000	12	5,000,000									13	10,000,000	
		Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	Jumlah klub olahraga prestasi non lembaga sekolah yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan (... Klub)		13 Klub	13	5,000,000	13	5,000,000									13	10,000,000	
		Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina	Jumlah organisasi Karang Taruna dan Karang Werdha yang dibina (... Organisasi)		26 Organisasi	26	5,000,000	26	5,000,000									26	10,000,000	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)		8 Laporan				10	131,000,000	10	131,000,000	10	131,000,000	10	140,531,000	10	533,531,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	rata-rata capaian realisasi terhadap target pada masing-masing kegiatan pendukung pemberdayaan		100%	100%	3,366,125,400	100	1,000,327,270	100	1,000,327,300	100	1,000,327,300	100	1,000,327,300	100	1,100,361,000	100	8,467,795,570	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3.1.02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun (Laporan)		1 Laporan		-		1	15,116,000	1	15,116,000	1	15,116,000	1	20,000,000	1	65,348,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3.1.02.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1 Laporan				1	15,116,000	1	15,116,000	1	15,116,000	1	20,000,000	1	65,348,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	Persentase Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang diselesaikan		100%	100%	3,366,125,400	100	1,000,327,270	100	985,211,300	100	985,211,300	100%	985,211,300	100%	1,080,361,000	100%	8,402,447,570	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah event musrenbang Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah event musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan (... Kali)		1 Kali	1	15,116,000	1	15,116,000								1 Kali	30,232,000		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5 Lembaga Kemasyarakatan				5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	100,000,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan	Jumlah infrastruktur/ tata lingkungan Kelurahan yang dibangun/ ditingkatkan (... Unit)		2 Unit	2	2,258,470,200	2	660,211,270								2 Unit	2,918,681,470		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2 Unit				2	660,211,300	2	660,211,300	2	660,211,300	2	710,211,000	2	2,690,844,900		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan (...kali)		1 Kali	1	1,092,539,200	1	325,000,000								1	1,417,539,200		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (...Kelompok Masyarakat)		5 Kelompok Masyarakat/Ormas				5	300,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	345,150,000	5	1,245,150,000		
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	Jumlah Konflik yang ditindaklanjuti / Jumlah Konflik yang terjadi		100%	100%	829,846,000	100	258,797,418	100	258,797,500	100	258,797,500	100	258,797,500	100	284,678,000	100	2,149,713,918	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun (... Dokumen)		14 Dokumen	14	68,000,000	14	68,000,000	14	68,000,000	14	68,000,000	14	68,000,000	14	68,000,000	14	408,000,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas koordinasi pelaksanaan trantribum	Jumlah fasilitas koordinasi pelaksanaan trantribum (... Kali)		2 kali	2	28,000,000	2	28,000,000								2 kali	56,000,000		

		Jumlah operasi/patrolu trantribum linmas yang dilakukan	Jumlah operasi/patrolu trantribum linmas (... Kall)		12 kali	12	40,000,000	12	40,000,000							12 kali	80,000,000		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan Bulanan)		12 Laporan				12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	160,000,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Laporan				1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	112,000,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.4.2.03.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang disusun (... Dokumen)		12 dokumen	12	761,846,000	12	190,797,418	12	190,797,500	12	190,797,500	12	190,797,500	12	216,678,000	12	1,741,713,918
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.4.2.03.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas koordinasi pelaksanaan trantribum	Jumlah fasilitas koordinasi pelaksanaan trantribum (... Kall)		2 kali	1	386,846,000	1	65,797,418								1	452,643,418	
		Jumlah operasi/patrolu trantribum linmas	Jumlah operasi/patrolu trantribum linmas (... Kall)		6 kali	6	250,000,000	6	100,000,000								6	350,000,000	
		Jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi	Jumlah pelayanan umum kelurahan yang difasilitasi (Rekomendasi)		5 Rekomendasi	5	125,000,000	5	25,000,000								5	150,000,000	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan Bulanan)		12 Laporan				12	190,797,500	12	190,797,500	12	190,797,500	12	190,797,500	12	789,070,500	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang seharusnya disusun dengan benar dan tepat waktu dikali seratus persen		100%	100%	65,517,000	100	52,080,000	100	52,080,000	100	52,080,000	100	52,080,000	100	57,288,000	100	331,125,000
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun (Dokumen)		56 Dokumen	56	65,517,000	56	52,080,000	56	52,080,000	56	52,080,000	56	52,080,000	56	57,288,000	56	331,125,000
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (... Kall)		8 Kali	8	34,000,000	8	34,000,000								8	68,000,000	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)		56 Dokumen	56	34,000,000	56	34,000,000	56	34,000,000	56	34,000,000	56	34,000,000	56	36,288,000	56	138,288,000
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		8 Dokumen	8	18,080,000	8	18,080,000	8	18,080,000	8	18,080,000	8	18,080,000	8	21,000,000	8	75,240,000
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan (kali)		2 Kali	2	13,437,000	2									2 Kali	13,437,000	
1.7.01.0.00.0.00.01.000.0.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang dilaksanakan (... Kall)		56 Kali	56	18,080,000	56	18,080,000								56 Kali	36,160,000	
		<b>Jumlah</b>					<b>11,945,526,067</b>		<b>9,439,439,353</b>		<b>9,439,439,500</b>		<b>9,439,439,500</b>		<b>9,439,439,500</b>		<b>10,383,386,000</b>		<b>60,085,669,920</b>



**REKAMENYAIAN LABORATORIUM TERPADU  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 2012**

**REKAMENYAIAN LABORATORIUM TERPADU  
 TAHUN 2012**

**PARTISIPAN**

**REKAMENYAIAN LABORATORIUM TERPADU  
 TAHUN 2012**

**REKAMENYAIAN LABORATORIUM**

**Partisipasi**

1. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan dosen pembimbing lapangan yang telah mengikuti seleksi.
2. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan dosen pembimbing lapangan yang telah mengikuti seleksi.

**Partisipasi**

1. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan dosen pembimbing lapangan yang telah mengikuti seleksi.
2. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan dosen pembimbing lapangan yang telah mengikuti seleksi.

- 1. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 2. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 3. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 4. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 5. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 6. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 7. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 8. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 9. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009
- 10. **Keputusan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2008** tentang Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009

- 11. ... (text is very faint and illegible)
- 12. ... (text is very faint and illegible)
- 13. ... (text is very faint and illegible)
- 14. ... (text is very faint and illegible)
- 15. ... (text is very faint and illegible)
- 16. ... (text is very faint and illegible)
- 17. ... (text is very faint and illegible)
- 18. ... (text is very faint and illegible)
- 19. ... (text is very faint and illegible)
- 20. ... (text is very faint and illegible)
- 21. ... (text is very faint and illegible)
- 22. ... (text is very faint and illegible)
- 23. ... (text is very faint and illegible)
- 24. ... (text is very faint and illegible)
- 25. ... (text is very faint and illegible)
- 26. ... (text is very faint and illegible)
- 27. ... (text is very faint and illegible)
- 28. ... (text is very faint and illegible)
- 29. ... (text is very faint and illegible)
- 30. ... (text is very faint and illegible)

ANNEX I. ICAIR

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

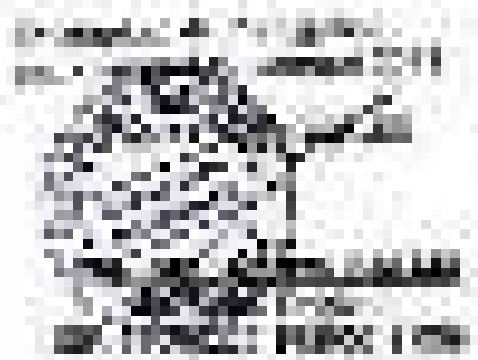
5. ...

... (text is very faint and illegible)

... (text is very faint and illegible)

... (text is very faint and illegible)

... (text is very faint and illegible)



LEARNING  
OBJECTIVES  
By the end of this chapter, you should be able to:  
1. explain the concept of a function  
2. determine the domain and range of a function  
3. sketch the graph of a function  
4. determine the inverse of a function  
5. solve problems involving functions

### 1.1 DEFINITION OF A FUNCTION

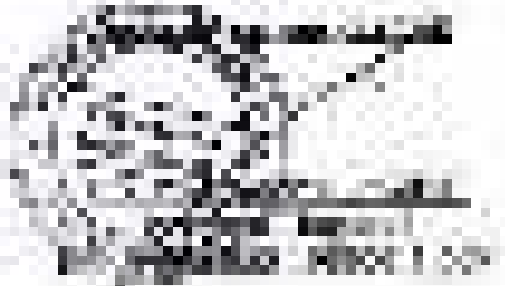
#### 1.1.1 DEFINITION OF A FUNCTION

- Example 1**
1. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  2. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  3. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  4. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  5. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  6. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  7. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  8. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  9. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.
  10. A set of ordered pairs  $(x, y)$  is given below. Determine whether it represents a function.

- Example 2**
1. Determine whether the following sets of ordered pairs represent a function.
  2. The graph of a function is shown below. Determine the domain and range of the function.
  3. The graph of a function is shown below. Determine the domain and range of the function.
  4. The graph of a function is shown below. Determine the domain and range of the function.
  5. The graph of a function is shown below. Determine the domain and range of the function.

- a. Para siapa dan untuk apa saja yang akan digunakan hasil penelitian ini?
- b. Bagaimana cara memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan objektif tentang fenomena yang akan diteliti?
- c. Bagaimana cara memperoleh data?
- d. Bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh agar dapat menggambarkan secara akurat dan objektif tentang fenomena yang diteliti?
- e. Bagaimana cara menyimpulkan hasil penelitian yang akan dilakukan? Apakah akan terdapat implikasi dari penelitian ini?

No.	Judul Penelitian	Latar Belakang Masalah	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Metode Penelitian
1.	Efektivitas penggunaan media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan.	Media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi.	Bagaimana efektivitas penggunaan media sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan?	Kuantitatif
2.	Pengaruh gaya hidup modern terhadap pola konsumsi masyarakat di kota-kota besar.	Gaya hidup modern yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan akses terhadap teknologi.	Bagaimana pengaruh gaya hidup modern terhadap pola konsumsi masyarakat di kota-kota besar?	Kuantitatif


  
 Universitas Pendidikan Indonesia  
 Jakarta



**UNIVERSITY OF ...**  
**DEPARTMENT OF ...**  
**...**

**PROBLEM ...**

...

...

...

...

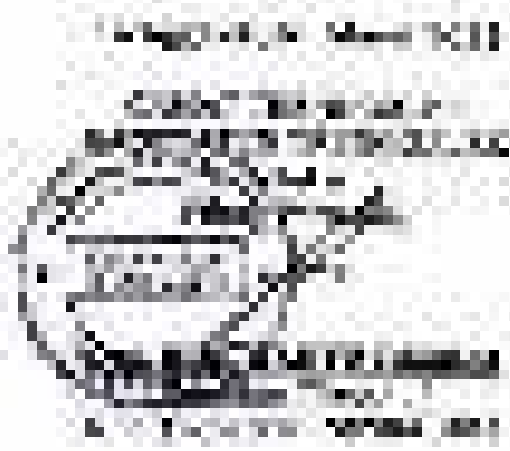
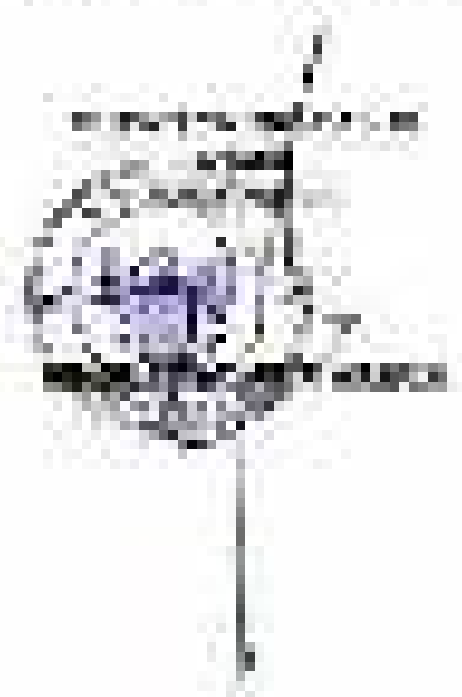
...

...

...

...

...



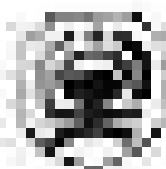


**PLANNING AND CONTROL SYSTEMS**  
**AND THE STRATEGIC MANAGEMENT PROCESS**

1.1	MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS	STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEMS	PLANNING
	Management Information Systems (MIS) provide information to support the day-to-day operations of the organization.	Strategic Management Systems (SMS) provide information to support the long-term strategic planning and control of the organization.	Planning
	MIS provides information to support the day-to-day operations of the organization.	SMS provides information to support the long-term strategic planning and control of the organization.	Planning

- QUESTIONS**
1. Explain the difference between MIS and SMS. (10 marks)
  2. Explain the difference between planning and control. (10 marks)
  3. Explain the difference between short-term and long-term planning. (10 marks)
  4. Explain the difference between strategic planning and tactical planning. (10 marks)
  5. Explain the difference between strategic control and tactical control. (10 marks)
- ANSWERS**
1. MIS provides information to support the day-to-day operations of the organization, while SMS provides information to support the long-term strategic planning and control of the organization.
  2. Planning is the process of setting goals and determining the best way to achieve them, while control is the process of monitoring progress and making adjustments as needed.
  3. Short-term planning focuses on the immediate future, while long-term planning focuses on the distant future.
  4. Strategic planning is the process of setting the overall direction of the organization, while tactical planning is the process of setting specific goals and determining the best way to achieve them.
  5. Strategic control is the process of monitoring progress and making adjustments as needed at the strategic level, while tactical control is the process of monitoring progress and making adjustments as needed at the tactical level.





**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
ĐÀO TẠO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHỌN VÀ CHỌN ĐƯỢC HỌC SINH**

Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo (ĐHGDĐT) là trường đại học chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo, được thành lập theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

**Họ tên:** Ông. Trần Văn Hùng

**Chức vụ:** Giảng viên Khoa Giáo dục

**Địa chỉ liên lạc:** Phòng Giáo dục

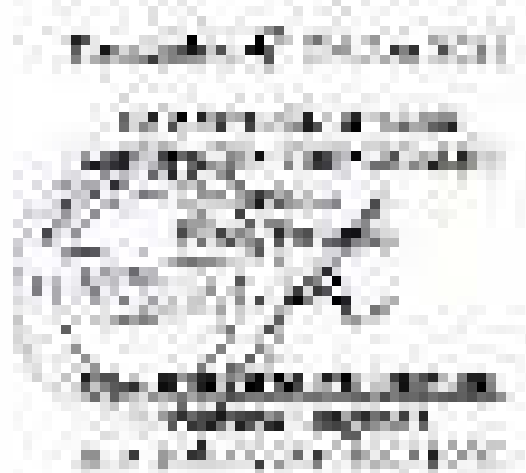
**Số điện thoại:** 0912 345 678

**Địa chỉ email:** tran.v.hung@hgd.edu.vn

Kính thưa Ban Giám đốc Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo,

Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Tôi mong muốn được tham gia vào đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo để được cống hiến và phát huy năng lực của mình. Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ đăng ký tuyển dụng và các tài liệu liên quan khác để Ban Giám đốc Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo xem xét và quyết định.

Mong Ban Giám đốc Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo chấp thuận và cho tôi cơ hội được tham gia vào đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo. Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc Trường Đại học Giáo dục và Đào tạo đã dành thời gian xem xét hồ sơ của tôi.



**REPUBLIC OF THE PHILIPPINES OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE GOVERNMENT**

NO.	DESCRIPTION OF EXPENDITURE	DATE OF THE RECEIPT	AMOUNT
	Administrative Expenses Office Supplies, Printing, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	11,000.00
	Administrative Expenses Travel, Printing, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00

NO.	DESCRIPTION OF EXPENDITURE	DATE OF THE RECEIPT	AMOUNT
1	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
2	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
3	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
4	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
5	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
6	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
7	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
8	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
9	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00
10	Printing of Reports, Books, etc.	1964, 1965, 1966, 1967, 1968	10,000.00

**OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE GOVERNMENT**  
 Manila  
 Philippines  
 1968

**OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE GOVERNMENT**  
 Manila  
 Philippines  
 1968



**REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF HEALTH  
GENERAL DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH  
INDONESIA - BUKING LAMPUNG**

**NOTA KLINIS PENYAKITAN PERSALINAN**

1. Nama lengkap pasien: **IRMA SARI, S.Pd**  
2. Tanggal lahir: **15 Desember 1985**  
3. Alamat: **Jl. Merdeka No. 12, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kota Lampung**

**Diagnosis:** **Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)**  
**Gejala:** **Demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan**

**Rekam medis:** **15 Desember 2023**  
**Diagnosis:** **ISPA**

1. Riwayat Penyakit: Pasien mengeluhkan demam, batuk, dan pilek sejak 3 hari yang lalu. Gejala semakin memburuk dengan munculnya nyeri tenggorokan saat menelan. Tidak ada keluhan sesak napas atau nyeri dada. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan dan kelelahan.

2. Pemeriksaan Fisik: Suhu tubuh 38,5°C, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 90/menit, tekanan darah 100/60 mmHg. Terdapat hiperemesis mukosa orofaringeal dan tonsil yang membesar dengan tonsilitis. Tidak ada wheezing atau ronkales.

3. Pemeriksaan Penunjang: Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis dengan peningkatan neutrofil. Kultur tenggorokan menunjukkan pertumbuhan Streptococcus pneumoniae.

4. Penatalaksanaan: Pasien diberikan antibiotik spektrum luas (Amoxicillin) dan analgesik untuk demam. Pasien juga disarankan untuk istirahat yang cukup dan minum banyak air putih.

**Dr. [Nama Dokter]**  
Spesialis Penyakit Dalam  
RS [Nama Rumah Sakit]

**Dr. [Nama Dokter]**  
Spesialis Kebidanan  
RS [Nama Rumah Sakit]

**REKAMENAN PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2020**

**REKAMENAN RUMAH SAKIT PROSPEK FUTURE ORIENTED**

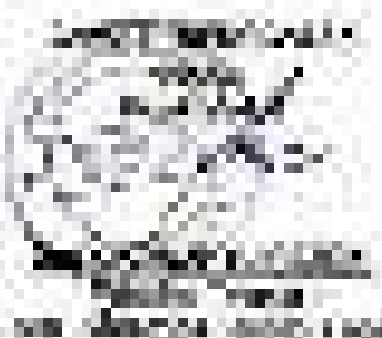
NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	PERSEN
1	Keterampilan dan sikap profesionalisme serta etika dan moral	Kegiatan pelatihan dan workshop kesehatan masyarakat	50%
		Keperawatan Komunitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Geriatri dan Keperawatan Perawatan Khusus	50%
		Keterampilan dan sikap profesionalisme	50%
2	Kelembagaan dan sumber daya manusia	Kelembagaan dan SDM	100%
3	Kelembagaan dan sumber daya manusia	Kelembagaan dan sumber daya manusia	100%
	Kelembagaan dan sumber daya manusia	Kelembagaan dan sumber daya manusia	100%

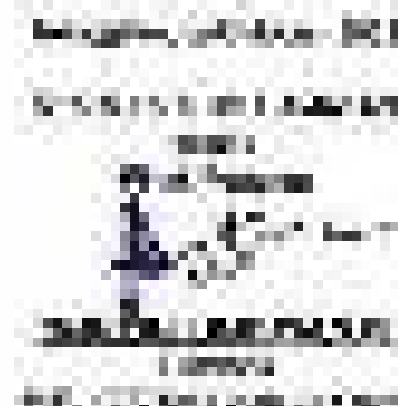
Disetujui

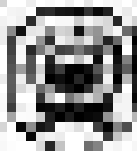
20 Desember 2015

P/1

**REKAMENAN PERENCANAAN STRATEGIS 2015-2020**


  
**UNIVERSITAS MITRA INDONESIA**  
 Jalan Mitra 1  
 Kota Bekasi - 17135


  
**PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945**  
 Jalan Proklamasi  
 Kota Bekasi - 17135



**REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN  
KEMAHIRAN TITIKS GALEK  
DI DAERAH DAERAH DI DAERAH DAERAH  
TERSEBUT-DI DAERAH DAERAH DAERAH**

**REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK**

Rekam-AMAL dan BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan.

**REKAM-AMAL** : Dokumen yang menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan.

**BUKTI PENYERAHAN** : Dokumen yang menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan.

**REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK**

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan. Dokumen ini menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan.

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan. Dokumen ini menunjukkan bahwa pemohon telah menyerahkan haknya kepada pihak yang berwenang untuk diproses dan diterbitkan.

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK



REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK



REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK

REKAM-AMAL DAN BUKTI PENYERAHAN TITIKS GALEK



**PROPOSAL FOR THE CONSTRUCTION OF THE PROJECT**

**SECTION 1 - GENERAL CONDITIONS**

NO.	DESCRIPTION OF WORK	UNIT OF MEASURE	QUANTITY
1	Excavation	Cubic Meter	1000
2	Foundation	Square Meter	500
3	Structure	Square Meter	1000
4	Roofing	Square Meter	1000
5	Interior Finishes	Square Meter	1000
6	Exterior Finishes	Square Meter	1000

1000

1000

1000

**SECTION 2 - SPECIFICATIONS**

1. Excavation shall be done in accordance with the specifications of the project.

2. Foundation shall be done in accordance with the specifications of the project.

3. Structure shall be done in accordance with the specifications of the project.

4. Roofing shall be done in accordance with the specifications of the project.

5. Interior Finishes shall be done in accordance with the specifications of the project.

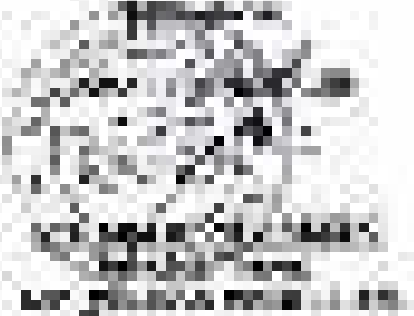
6. Exterior Finishes shall be done in accordance with the specifications of the project.

The quality of the work shall be in accordance with the specifications of the project.

The quantity of the work shall be in accordance with the specifications of the project.

The cost of the work shall be in accordance with the specifications of the project.

The time of the work shall be in accordance with the specifications of the project.



OFFICE OF THE SECRETARY  
 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS  
 MALACANAN, MANILA



REKAPITULASI KASUS/LAJAK PERKAWAN  
**KEMAMATAN TRIYOGALEK**  
 JALAN PONDOKREJO NO. 100  
 TEL. (021) 5200611 - 5200612

**PERIKULIAH PEPERIKSAAN KEMAMATAN TRIYOGALEK**

Untuk keperluan rekam medis dan pelayanan pasien, mohon agar data rekam medis dan riwayat medis keluarga pasien yang telah selesai diperiksa di kirimkan ke:

- Tempat:** Ruang Rawat Inap, RS
- Alamat:** Jalan Raya Tugu Perumahan Pondok Kelapa, Tugu Perumahan, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Kertaya, Jakarta Timur
- Waktu:** Hari dan Waktu Pemeriksaan
- Revisi:** (jika ada) (jika ada) (jika ada)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat ini kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakjelasan, mohon segera menghubungi kami melalui telepon atau datang langsung ke alamat kami. Kami akan segera menindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat ini kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakjelasan, mohon segera menghubungi kami melalui telepon atau datang langsung ke alamat kami. Kami akan segera menindaklanjuti. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**REKAPITULASI KASUS/LAJAK PERKAWAN**  
 (nama)  
 (alamat)

*(Signature)*

**REKAPITULASI KASUS/LAJAK PERKAWAN**  
 (nama)  
 (alamat)

**REKAPITULASI KASUS/LAJAK PERKAWAN**  
 (nama)  
 (alamat)

*(Signature)*

**REKAPITULASI KASUS/LAJAK PERKAWAN**  
 (nama)  
 (alamat)





**FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE EJERCICIO**

**FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE EJERCICIO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA LICENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA CANCELACIÓN	FECHA
1	Licencia de Ejercicio de la Profesión de Abogado	Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.	20/05/2024
2	Licencia de Ejercicio de la Profesión de Arquitecto	Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.	20/05/2024
3	Licencia de Ejercicio de la Profesión de Ingeniero	Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.	20/05/2024
4	Licencia de Ejercicio de la Profesión de Médico	Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.	20/05/2024
5	Licencia de Ejercicio de la Profesión de Psicólogo	Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.	20/05/2024
6	Licencia de Ejercicio de la Profesión de Profesor	Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.	20/05/2024

**Observaciones**

1. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

2. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

3. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

4. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

5. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

6. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

7. Cese de la actividad profesional por voluntad propia del titular de la licencia.

Fecha de Expedición:

Expediente:

10

10/05/2024

Firma:

10

10/05/2024

10

10/05/2024

10

10/05/2024

10

10/05/2024

10

10/05/2024

10

10/05/2024

10

10/05/2024

10

10/05/2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría de  
Ejecución y Control

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA





**2023-2024 BUDGET REQUEST FOR THE COMMUNITY CENTER**

**1.1. BUDGET REQUEST FOR THE COMMUNITY CENTER**

NO	DESCRIPTION OF THE REQUEST	AMOUNT REQUESTED	REMARKS
1	Personnel for the community center	1 year contract for 10 positions including management	200,000,000
2	Materials for the community center	1 year contract for 10 positions including management	100,000,000
3	Materials for the community center	1 year contract for 10 positions including management	100,000,000
4	Materials for the community center	1 year contract for 10 positions including management	100,000,000
5	Materials for the community center	1 year contract for 10 positions including management	100,000,000
6	Materials for the community center	1 year contract for 10 positions including management	100,000,000

**1.2. BUDGET REQUEST**

TOTAL REQUESTED: 600,000,000

1.2.1. Budget Request for the Community Center

**1.2.1.1. Personnel**

1.2.1.1.1. Personnel for the community center (10 positions) 200,000,000

1.2.1.2. Budget Request for the Community Center

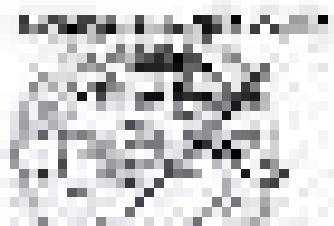
**1.2.1.2.1. Personnel**

1.2.1.2.1.1. Personnel for the community center (10 positions) 100,000,000

1.2.1.2.1.2. Personnel for the community center (10 positions) 100,000,000

TOTAL REQUESTED: 400,000,000

TOTAL REQUESTED: 600,000,000

  
 \_\_\_\_\_  
 Requester Name  
 Requester Position  
 Requester Contact Information

Requested for the year 2023  
 \_\_\_\_\_  
 Requester Name  
 Requester Position  
 Requester Contact Information



**REPUBLIC OF INDONESIA**  
**MINISTRY OF HEALTH**  
 REPUBLIC OF INDONESIA  
**TRICHINELLA - December 2017**

**REPUBLIC OF INDONESIA - REPUBLIC OF INDONESIA**

Dear members, we are pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable.

Name: **TRICHINELLA**

Address: **111, Jalan Kuningan, Jakarta, Indonesia**

Phone: **021-5555555**

Website: **www.trichinella.com**

Dear members, we are pleased to see you here today.

I am pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable. We are pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable. We are pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable.

I am pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable. We are pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable. We are pleased to see you here today, and we hope that you will find this meeting useful and enjoyable.



**REKAM JEJAK PERUSAHAAN**

REKAM JEJAK PERUSAHAAN : BUKU NO. 001/2017

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Pembukaan Perusahaan	15/01/2017
2	Pembentukan Komite	15/01/2017
3	Pembentukan Komite	15/01/2017
4	Pembentukan Komite	15/01/2017

REKAM JEJAK PERUSAHAAN : BUKU NO. 001/2017

REKAM JEJAK PERUSAHAAN : BUKU NO. 001/2017

REKAM JEJAK PERUSAHAAN : BUKU NO. 001/2017

REKAM JEJAK PERUSAHAAN : BUKU NO. 001/2017

REKAM JEJAK PERUSAHAAN : BUKU NO. 001/2017



**REKAMENYAI BUKU SAJAH TERKAWALAN  
KECAMATAN TRENGGALEH**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN  
KEPENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA - BUKU 104/01/11

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TANGGAL 2003**

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kependidikan dan  
pelayanan masyarakat pada tingkat Kecamatan, serta meningkatkan efisiensi dan  
efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan, ditetapkan  
aturan sebagai berikut:

- 1. Nama: **REKAMENYAI BUKU SAJAH**
- 2. Tujuan: **Menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat**
- 3. Maksud: **Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kependidikan**
- 4. Dasar: **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001**
- 5. Ruang Lingkup: **Rekamenyai Buku Sajah**

Menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan aturan sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kependidikan dan  
pelayanan masyarakat pada tingkat Kecamatan, serta meningkatkan efisiensi dan  
efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan, ditetapkan  
aturan sebagai berikut:

2. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga kependidikan dan  
pelayanan masyarakat pada tingkat Kecamatan, serta meningkatkan efisiensi dan  
efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan, ditetapkan  
aturan sebagai berikut:



# 2019-2020 BUDGETARY APPROPRIATION REPORT

## DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES - COMMUNITY SERVICES

NO.	DEPARTMENTAL PROGRAM	DEPARTMENTAL OBJECTS	CLASSIFICATION
1	Community Health Services	1000 - Salaries and Benefits	1000
2	Community Health Services	2000 - Travel	2000
3	Community Health Services	3000 - Printing and Reproduction	3000
4	Community Health Services	4000 - Information Technology	4000
5	Community Health Services	5000 - Supplies and Materials	5000
6	Community Health Services	6000 - Contract Services	6000
7	Community Health Services	7000 - Capital Equipment	7000
8	Community Health Services	8000 - Debt Service	8000
9	Community Health Services	9000 - Miscellaneous	9000

NO.	DEPARTMENTAL PROGRAM	DEPARTMENTAL OBJECTS	CLASSIFICATION
10	Community Health Services	1000 - Salaries and Benefits	1000
11	Community Health Services	2000 - Travel	2000
12	Community Health Services	3000 - Printing and Reproduction	3000
13	Community Health Services	4000 - Information Technology	4000
14	Community Health Services	5000 - Supplies and Materials	5000
15	Community Health Services	6000 - Contract Services	6000
16	Community Health Services	7000 - Capital Equipment	7000
17	Community Health Services	8000 - Debt Service	8000
18	Community Health Services	9000 - Miscellaneous	9000

Prepared and submitted to:  
 THE BOARD OF SUPERVISORS  
 COUNTY OF SAN DIEGO  
 1200 G STREET, 12TH FLOOR  
 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101

Prepared and submitted by:  
 THE DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES  
 COMMUNITY SERVICES  
 1200 G STREET, 12TH FLOOR  
 SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101





**REVENUE AND FINANCIAL STATEMENTS FOR 2000**

**REVENUE AND FINANCIAL STATEMENTS FOR 2000**

REVENUE	AMOUNT	PERCENT
Revenue from the sale of goods	1,234,567	85.2%
Revenue from the sale of services	210,987	14.8%
<b>Total Revenue</b>	<b>1,445,554</b>	<b>100.0%</b>
Operating Expenses	987,654	68.3%
Depreciation and Amortization	123,456	8.6%
Interest Expense	56,789	3.9%
Income Tax Expense	234,567	16.3%
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>987,654</b>	<b>68.3%</b>
<b>Operating Profit</b>	<b>457,900</b>	<b>31.7%</b>

EXPENSE	AMOUNT	PERCENT
Cost of Goods Sold	1,000,000	69.2%
Operating Expenses	987,654	68.3%
Depreciation and Amortization	123,456	8.6%
Interest Expense	56,789	3.9%
Income Tax Expense	234,567	16.3%
<b>Total Expenses</b>	<b>1,422,406</b>	<b>98.4%</b>
<b>Operating Profit</b>	<b>457,900</b>	<b>31.7%</b>

**Operating Profit**  
 457,900  
 31.7%

**Operating Profit**  
 457,900  
 31.7%

**Formulir E.60**  
**Evaluasi Terhadap Hasil RKP**  
**Kabupaten / Kota Trenggalek**  
**Tahun 2023**

**Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:**

Khusus Unit: KECAMATAN TRENGGALEK

Export pada: 30 January 2024 14:04:24

Nomor Urut Program Prioritas	Sasaran Pembangunan Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target RPJMD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
					6		7		8		9		10		11		12		13				14		15	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.
		7-01	Bidang Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		9,439,439,500.00	14,345,180,949.00	8,966,298,168.00	972,215,146.00	2,605,082,003.00	1,880,235,910.00	2,555,365,007.00	8,012,898,066.00	22,358,079,015.00	0.00												
		7-01-00-00-00-01	KECAMATAN TRENGGALEK		9,439,439,500.00	14,345,180,949.00	8,966,298,168.00	972,215,146.00	2,605,082,003.00	1,880,235,910.00	2,555,365,007.00	8,012,898,066.00	22,358,079,015.00	0.00												
		7-01-00-00-00-01-01	KECAMATAN TRENGGALEK		9,439,439,500.00	10,802,363,352.00	6,375,918,478.00	834,773,932.00	2,177,805,648.00	1,254,088,358.00	1,505,854,457.00	5,772,522,395.00	16,574,885,747.00	0.00												
		7-01-7-01-00-00-01-01-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi dan nilai aset dalam kondisi baik Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %100.00 %	7,930,797,700.00	10,541,048,338.00 %100.00 %	6,076,193,748.00 %20.00 %96.40 %	8.80 %19.24 %97.77 %	40.21 %37.84 %97.84 %	1,219,310,858.00 %22.92 %97.81 %	1,376,519,757.00 %389.82 %	5,484,582,045.00 %389.82 %	120.36 %100.00 %389.82 %	120.36 %100.00 %389.82 %	16,025,630,383.00 %100.00 %	120,36100,00389,82	202.07								
		7-01-7-01-00-00-01-01-2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	0.00	18,647,500.00	37.00 Dokumen	15,500,000.00 9.00 Dokumen 0.00 Dokumen	2,234,400.00 14.00 Dokumen	3,850,000.00 14.00 Dokumen	2,750,000.00 4.00 Dokumen	5,360,500.00 41 Dokumen 0 Dokumen	14,194,900.00 41 Dokumen 0 Dokumen	32,842,400.00	0.00											
		7-01-7-01-00-00-01-01-2-01-1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	5,000.00	14 Dokumen	5,500,000.00 3 Dokumen	0.00 2 Dokumen	1,293,800.00 5 Dokumen	1,250,000.00 4 Dokumen	2,341,000.00 14 Dokumen	4,884,800.00	15	19,026,300.00	0.00										
		7-01-7-01-00-00-01-01-6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00	21.00	55 Laporan	10,000,000.00 6 Laporan	2,234,400.00 12 Laporan	2,556,200.00 8 Laporan	1,500,000.00 29 Laporan	3,019,500.00 55 Laporan	9,310,100.00	76	13,816,100.00	0.00										

		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	10,308,851,090.00	100,00 %	5,787,614,348.00	24.00 %	722,810,653.00	66.15 %	2,078,835,590.00	85.09 %	1,155,965,522.00	53.73 %	1,248,440,389.00	228.97 %	5,206,052,154.00	228.97 %	15,514,903,244.00	0.00		
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-02-1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0.00	9,00	10,022,396,686.00	44 Orang/Bulan	5,695,464,348.00	45 Orang/Bulan	697,805,653.00	42 Orang/Bulan	2,061,130,590.00	40 Orang/Bulan	1,129,455,522.00	44 Orang/Bulan	1,225,626,889.00	171 Orang/Bulan	5,114,018,654.00	180	15,136,415,340.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-02-2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0.00	9,00	286,454,404.00	47 Dokumen	89,150,000.00	3 Dokumen	25,005,000.00	2 Dokumen	17,705,000.00	33 Dokumen	24,580,000.00	9 Dokumen	21,856,500.00	47 Dokumen	89,146,500.00	56	375,600,904.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-02-3	Pelaksanaan Penatuaahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuaahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0.00	0,00	1,000,000.00	227 Dokumen	0	0 Dokumen	0.00	321 Dokumen	0.00	345 Dokumen	940,000.00	183 Dokumen	0.00	849 Dokumen	940,000.00	849	940,000.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-02-7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0.00	0,00	2,000,000.00	33 Laporan	7	7 Laporan	0.00	12 Laporan	0.00	9 Laporan	990,000.00	5 Laporan	957,000.00	33 Laporan	1,947,000.00	33	1,947,000.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan		0.00	0.00	100,00 %	1,000,000.00	10.00 %	0.00	16.00 %	0.00	25.00 %	500,000.00	50.00 %	500,000.00	101 %	1,000,000.00	101 %	1,000,000.00	0.00		
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-03-6	Penatuaahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatuaahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0.00	0,00	1,000,000.00	12 Laporan	1	1 Laporan	0.00	2 Laporan	0.00	3 Laporan	500,000.00	6 Laporan	500,000.00	12 Laporan	1,000,000.00	12	1,000,000.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	10,675,000.00	100,00 %	14,000,000.00	5.00 %	0.00	45.83 %	0.00	28.64 %	2,929,750.00	81.52 %	9,974,000.00	160.99 %	12,903,750.00	160.99 %	23,578,750.00	0.00		
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-05-3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0.00	0,00	2,000,000.00	59 Dokumen	7	7 Dokumen	0.00	11 Dokumen	0.00	11 Dokumen	1,280,000.00	30 Dokumen	539,000.00	59 Dokumen	1,819,000.00	59	1,819,000.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-05-9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0.00	0,00	10,675,000.00	44 Orang	12,000,000.00	0	0 Orang	0.00	0 Orang	0.00	17 Orang	1,649,750.00	27 Orang	9,435,000.00	44 Orang	11,084,750.00	44	21,759,750.00	0.00
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	104,218,852.00	100,00 %	64,759,400.00	17.00 %	10,920,734.00	35.66 %	6,041,777.00	37.33 %	13,822,490.00	26.33 %	32,733,826.00	116.32 %	63,518,827.00	116.32 %	167,737,679.00	0.00		
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-06-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0.00	5,00	1,415,000.00	2 Paket	1,417,000.00	0	0 Paket	0.00	1 Paket	600,000.00	1 Paket	815,000.00	0	0	1,415,000.00	7	2,830,000.00	0.00	
		7-01-7-01.0-00.0-01-01-01-2-06-4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0.00	53,00	102,803,852.00	10 Paket	3,251,000.00	0	0 Paket	0.00	2 Paket	720,000.00	4 Paket	0.00	4 Paket	2,239,200.00	10 Paket	2,959,200.00	63	105,763,052.00	0.00

		7-01.7-01.0-00.0-01-2.06-5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0.00	0.00	10 Paket	7,500,000.00	1 Paket	1,000,000.00	1 Paket	770,000.00	3 Paket	1,686,600.00	5 Paket	4,028,800.00	10 Paket	7,485,400.00	10	7,485,400.00	0.00					
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.06-7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			0.00	0.00	0.00	6 Paket	32,580,500.00	1 Paket	6,930,734.00	2 Paket	1,704,777.00	4 Paket	9,950,890.00	1 Paket	13,223,826.00	8 Paket	31,810,227.00	8	31,810,227.00	0.00					
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.06-9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0.00	0.00	0.00	8 Laporan	20,010,900.00	2 Laporan	2,990,000.00	2 Laporan	2,247,000.00	1 Laporan	1,370,000.00	2 Laporan	13,242,000.00	7 Laporan	19,849,000.00	7	19,849,000.00	0.00					
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan			0.00	48,775,000.00	100.00 %		70,000,000.00	0.00 %	0.00	4.17 %		7,210,000.00	20.83 %		11,655,000.00	50.00 %		49,895,000.00	75 %	68,760,000.00	75 %	117,535,000.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.07-2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0.00	0.00	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0	0.00	0.00					
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.07-6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0.00	0.00	48,775,000.00	12 Unit	70,000,000.00	0 Unit	0.00	1 Unit		7,210,000.00	5 Unit		11,655,000.00	6 Unit		49,895,000.00	12 Unit	68,760,000.00	12	117,535,000.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan			0.00	14,363,396.00	100.00 %		104,570,000.00	24.00 %	24,023,245.00	41.66 %		30,209,031.00	25.00 %		23,955,096.00	53.21 %		23,215,542.00	143.87 %	101,402,914.00	143.87 %	115,766,310.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.08-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0.00	30,007.29	5,00364.205.00	36 Laporan	20,930,000.00	3 Laporan	5,114,420.00	9 Laporan		5,300,208.00	9 Laporan		5,046,273.00	15 Laporan		3,967,930.00	36 Laporan	19,428,831.00	6.67E+11	33,792,227.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.08-4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0.00	0.00	0.00	13 Laporan	83,640,000.00	3 Laporan	18,908,825.00	4 Laporan		24,908,823.00	3 Laporan		18,908,823.00	3 Laporan		19,247,612.00	13 Laporan	81,974,083.00	13	81,974,083.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Daerah yang dipelihara			0.00	35,517,500.00	100.00 %		18,750,000.00	8.82 %	2,116,000.00	7.11 %		500,000.00	60.00 %		7,733,000.00	33.33 %		6,400,500.00	109.26 %	16,749,500.00	109.26 %	52,267,000.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.09-2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0.00	5.00	1,607,500.00	12 Unit	5,000,000.00	2 Unit	1,116,000.00	1 Unit		500,000.00	4 Unit		466,000.00	5 Unit		2,411,000.00	12 Unit	4,493,000.00	17	6,100,500.00	0.00		
		7-01.7-01.0-00.0-01-2.09-4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			0.00	0.00	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit		0.00	0 Unit		0.00	0 Unit		0.00	0 Unit	0.00	0	0.00	0.00		

		7-01.7-01.0-00.0-01-01-2.09-5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0.00	0,00	2,000,000.00	2	Unit	1,250,000.00	0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	2	Unit	1,100,000.00	2	Unit	1,100,000.00	2	3,100,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.0-01-01-2.09-6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0.00	4,00	16,322,500.00	12	Unit	5,000,000.00	0	Unit	0.00	1	Unit	0.00	8	Unit	2,000,000.00	3	Unit	2,465,000.00	12	Unit	4,465,000.00	16	20,787,500.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-01-2.09-9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	1,00	15,587,500.00	1	Unit	5,000,000.00	0	Unit	0.00	0	Unit	0.00	1	Unit	3,917,000.00	0	Unit	424,500.00	1	Unit	4,341,500.00	2	19,929,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.0-01-01-2.09-10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	0,00	0.00	1	Unit	2,500,000.00	1	Unit	1,000,000.00	0	Unit	0.00	1	Unit	1,350,000.00	0	Unit	0.00	2	Unit	2,350,000.00	2	2,350,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-01-02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100,00 %		197,437,000.00	137,641,500.00	100,00 %		174,128,730.00	20,00 %		34,951,000.00	25,00 %		39,119,350.00	33,00 %		4,774,000.00	22,00 %		87,655,900.00	100,00 %		166,500,250.00	100,00 %	304,141,750.00	100,00	154.04
		7-01.7-01.0-00.0-02-2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dokumen).	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun (dokumen).		0.00		12,525,500.00	1,00	Dokumen	26,437,000.00	1,00	Dokumen	24,715,000.00	0,00	Dokumen	1,500,000.00	0,00	Dokumen	0.00	0,00	Dokumen	0.00	1	Dokumen	26,215,000.00	1	Dokumen	38,740,500.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.0-02-2.01-1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0.00	2,001,00	12,525,500.00	2	Laporan	26,437,000.00	2	Laporan	24,715,000.00	0	Laporan	1,500,000.00	0	Laporan	0.00	0	Laporan	0.00	2	Laporan	26,215,000.00	4	38,740,500.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.0-02-2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen/ Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun		0.00		125,116,000.00	3,00	Dokumen	147,691,730.00	1,00	Dokumen	10,236,000.00	1,00	Dokumen	37,619,350.00	1,00	Dokumen	4,774,000.00	0,00	Dokumen	87,655,900.00	3	Dokumen	140,285,250.00	3	Dokumen	265,401,250.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.0-02-2.04-1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan		0.00	0,007,001,4,00	15,677,000.00	12	Dokumen	28,000,000.00	0	Dokumen	0.00	1	Dokumen	13,456,000.00	8	Dokumen	0.00	3	Dokumen	9,922,600.00	12	Dokumen	23,378,600.00	12714	39,055,600.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.0-02-2.04-3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		0.00	1,004,001,001,000,00,009,00,002,00	109,439,000.00	12	Laporan	119,691,730.00	1	Laporan	10,236,000.00	3	Laporan	24,163,350.00	5	Laporan	4,774,000.00	3	Laporan	77,733,300.00	12	Laporan	116,906,650.00	1.34E+08	226,345,650.00	0.00	

		7-01-7-01.0-00.0-01-01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100,00 %	1.000.327.300,00	0,00	100,00 %	12.116.000,00	100,00 %	11.523.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11.523.000,00	100,00 %	11.523.000,00	100,00	1,15		
		7-01-7-01.0-00.0-03-2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun		0,00	0,00	1,00 Laporan	12.116,000,00	1,00 Laporan	11,523,000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	11,523,000,00	1,00 Laporan	11,523,000,00		0,00		
		7-01-7-01.0-00.0-03-2.01-3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	1 Laporan	12.116,000,00	1 Laporan	11,523,000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	11,523,000,00	1	11,523,000,00		0,00		
		7-01-7-01.0-00.0-04-01-01-04	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100,00 %	258.797.500,00	73.999.814,00	100,00 %	55,000,000,00	100,00 %	19,019,800,00	100,00 %	7,561,300,00	100,00 %	17,486,500,00	100,00 %	10,175,300,00	400,00 %	54,242,900,00	400,00 %	128,242,714,00	400,00	49,55
		7-01-7-01.0-00.0-04-2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum yang disusun.		0,00	73.999,814,00	12,00 Dokumen	55,000,000,00	3,00 Dokumen	19,019,800,00	3,00 Dokumen	7,561,300,00	3,00 Dokumen	17,486,500,00	3,00 Dokumen	10,175,300,00	12 Dokumen	54,242,900,00	12 Dokumen	128,242,714,00	0,00	
		7-01-7-01.0-00.0-04-2.01-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	3,005,00	73,999,814,00	12 Laporan	40,000,000,00	1 Laporan	12,964,000,00	3 Laporan	7,561,300,00	3 Laporan	11,971,500,00	5 Laporan	7,100,000,00	12 Laporan	39,596,800,00	15	113,596,614,00	0,00	
		7-01-7-01.0-00.0-04-2.01-2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2 Laporan	15,000,000,00	1 Laporan	6,055,800,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	5,515,000,00	0,00 Laporan	3,075,300,00	2 Laporan	14,646,100,00	2	14,646,100,00	0,00	
		7-01-7-01.0-00.0-06-01-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100,00 %	52.080.000,00	49.673.700,00	100,00 %	58.480.000,00	14,00 %	7.175.100,00	16,00 %	4.478.600,00	16,00 %	12.517.000,00	54,00 %	31.503.500,00	100,00 %	55.674.200,00	100,00 %	105.347.900,00	100,00	202,28
		7-01-7-01.0-00.0-06-2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	0,00	0,00	49,673,700,00	12,00 Dokumen	58,480,000,00	8,00 Dokumen	7,175,100,00	2,00 Dokumen	4,478,600,00	2,00 Dokumen	12,517,000,00	0,00 Dokumen	31,503,500,00	12 Dokumen	55,674,200,00	12 Dokumen	105,347,900,00	0,00	
		7-01-7-01.0-00.0-06-2.01-3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	5,00	49,673,700,00	6 Dokumen	30,400,000,00	16 Dokumen	4,028,000,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	12,517,000,00	1 Dokumen	11,357,000,00	21 Dokumen	27,902,000,00	26	77,575,700,00	0,00	

7-01-7-01.0-00.0-01-06-2.01-3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0.00	0.00	0.00	6 Dokumen	28,080,000.00	2 Dokumen	3,147,100.00	2 Dokumen	4,478,600.00	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	20,146,500.00	6 Dokumen	27,772,200.00	6	27,772,200.00	0.00			
7-01-0-00.0-00.0-01-02	KELURAHAN SURODAKAN		0.00				727,867,743.00		490,850,500.00		17,010,735.00		66,253,596.00		118,918,856.00		262,639,167.00		464,822,354.00		1,192,690,097.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-02-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0.00				141,948,803.00	100.00 % 100.00 % 100.00 %	134,833,182.00	20.00 % 97.77 %	12,052,535.00	21.21 % 97.77 %	35,657,596.00	34.33 % 97.84 %	31,062,106.00	40.11 % 97.81 %	45,216,867.00	115.65 % 90.00 % 391.19 %	123,989,104.00	115.65 % 90.00 % 391.19 %	265,937,907.00	115,650,000.00	0.00
7-01-7-01.0-00.0-01-02-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00				103,529,821.00	100.00 %	29,040,000.00	0.00 %	0.00	25.00 %	6,460,000.00	50.00 %	8,480,000.00	25.00 %	8,850,000.00	100 %	23,790,000.00	100 %	127,319,821.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-02-02-2	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	7.00			103,529,821.00	12 Dokumen	29,040,000.00	0 Dokumen	0.00	3 Dokumen	6,460,000.00	6 Dokumen	8,480,000.00	3 Dokumen	8,850,000.00	12 Dokumen	23,790,000.00	19	127,319,821.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00				21,938,266.00	100.00 %	12,103,182.00	10.00 %	0.00	10.50 %	3,364,250.00	28.00 %	3,403,900.00	62.00 %	5,126,550.00	110.5 %	11,894,700.00	110.5 %	33,832,966.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-06-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.00	0.00			0.00	1 Paket	779,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	1 Paket	748,000.00	0 Paket	0.00	1 Paket	748,000.00	1	748,000.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-06-4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0.00	14.00			21,938,266.00	10 Paket	1,000,000.00	0 Paket	0.00	1 Paket	308,000.00	0 Paket	0.00	9 Paket	632,500.00	10 Paket	940,500.00	24	22,878,766.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-06-5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0.00	0.00			0.00	10 Paket	2,000,000.00	0 Paket	0.00	2 Paket	989,500.00	0 Paket	0.00	8 Paket	983,100.00	10 Paket	1,972,600.00	10	1,972,600.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-06-7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0.00	0.00			0.00	10 Paket	7,000,000.00	0 Paket	0.00	2 Paket	2,066,750.00	4 Paket	2,655,900.00	4 Paket	2,200,950.00	10 Paket	6,923,600.00	10	6,923,600.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-06-9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0.00			0.00	6 Laporan	1,324,182.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	6 Laporan	1,310,000.00	6 Laporan	1,310,000.00	6	1,310,000.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00				2,058,716.00	100.00 %	82,440,000.00	20.00 %	12,052,535.00	27.88 %	24,348,346.00	28.00 %	17,982,206.00	33.33 %	24,133,317.00	109.21 %	78,516,404.00	109.21 %	80,575,120.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-08-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	20,00379,00143.567,00			2,058,716.00	36 Laporan	8,500,000.00	3 Laporan	1,052,535.00	9 Laporan	1,952,982.00	15 Laporan	1,482,206.00	9 Laporan	1,474,377.00	36 Laporan	5,962,100.00	5.64E+10	8,020,816.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-01-02-08-4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0.00			0.00	12 Laporan	73,940,000.00	3 Laporan	11,000,000.00	4 Laporan	22,395,364.00	3 Laporan	16,500,000.00	2 Laporan	22,658,940.00	12 Laporan	72,554,304.00	12	72,554,304.00	0.00	

		7-01.7-01.0-00.00.01-02-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0.00	14,422,000.00	100.00 %	11,250,000.00	0.00 %	0.00	16.67 %	1,485,000.00	25.00 %	1,196,000.00	58.33 %	7,107,000.00	100 %	9,788,000.00	100 %	24,210,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-01-2.09-6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	4,285,000.00	2 Unit	4,250,000.00	0 Unit	0.00	1 Unit	1,485,000.00	1 Unit	1,196,000.00	0 Unit	881,000.00	2 Unit	3,562,000.00	3	7,847,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-01-2.09-9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	10,137,000.00	1 Unit	7,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	6,226,000.00	1 Unit	6,226,000.00	1	16,363,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0.00	585,918,940.00	100.00 %	329,857,818.00	10.00 %	4,958,200.00	26.67 %	24,896,000.00	50.00 %	87,856,750.00	50.00 %	204,137,300.00	136.67 %	321,848,250.00	136.67 %	907,767,190.00	136.67	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-03-2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	0.00	585,918,940.00	2.00 Dokumen	329,857,818.00	1.00 Dokumen	4,958,200.00	1.00 Dokumen	24,896,000.00	1.00 Dokumen	87,856,750.00	1.00 Dokumen	204,137,300.00	4.00 Dokumen	321,848,250.00	4.00 Dokumen	907,767,190.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-03-2.02-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00	0.00	1 LemBKem asyarakat an	5,000,000.00	1 LemBKem asyarakat an	4,958,200.00	0 LemBKem asyarakat an	0.00	0 LemBKem asyarakat an	0 LemBKem asyarakat an	0.00	0.00	1 LemBKem asyarakat an	4,958,200.00	1	4,958,200.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-03-2.02-2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0.00	439,254,950.00	2 Unit	203,177,818.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	64,373,500.00	1 Unit	137,908,000.00	2 Unit	202,281,500.00	3	641,536,450.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-03-2.02-3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0.00	146,663,990.00	5 Pokmas/O rmas	121,680,000.00	0 Pokmas/O rmas	0.00	1 Pokmas/O rmas	24,896,000.00	2 Pokmas/O rmas	23,483,250.00	2 Pokmas/O rmas	66,229,300.00	5 Pokmas/O rmas	114,608,550.00	62	261,272,540.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0.00	0.00	100.00 %	26,159,500.00	0.00 %	0.00	100.00 %	5,700,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	13,285,000.00	300.00 %	18,985,000.00	300.00 %	18,985,000.00	300.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-02-04-7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	0.00	0.00	12.00 Dokumen	26,159,500.00	0.00 Dokumen	0.00	3.00 Dokumen	5,700,000.00	3.00 Dokumen	0.00	6.00 Dokumen	13,285,000.00	12.00 Dokumen	18,985,000.00	12.00 Dokumen	18,985,000.00	0.00	
		7-01.7-01.0-00.00.01-03-04-7.03-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	1 Laporan	26,159,500.00	0 Laporan	0.00	3 Laporan	5,700,000.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	13,285,000.00	3 Laporan	18,985,000.00	3	18,985,000.00	0.00	
		7-01.0-00.00.01-03	KELURAHAN SUMBERGEOO NG		0.00	713,366,713.00		553,384,550.00		39,893,895.00		106,820,160.00		142,355,304.00		254,571,056.00		543,640,415.00		1,257,007,128.00	0.00	





7-01-7-01.0-00.0-03-01-2.09-9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0,00	11,293,000.00	1 Unit	53,569,500.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	4,320,000.00	1 Unit	48,741,500.00	2 Unit	53,061,500.00	2	64,354,500.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0.00		509,539,600.00	100,00 %	312,464,550.00	20,00 %	8,821,200.00	26,67 %	74,184,400.00	50,00 %	94,599,800.00	50,00 %	133,243,700.00	146,67 %	310,849,100.00	146,67 %	820,388,700.00	146,67	0.00
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-03-2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	0.00		509,539,600.00	2,00 Dokumen	312,464,550.00	1,00 Dokumen	8,821,200.00	1,00 Dokumen	74,184,400.00	1,00 Dokumen	94,599,800.00	1,00 Dokumen	133,243,700.00	4 Dokumen	310,849,100.00	4 Dokumen	820,388,700.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-03-2.02-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00	0,00	0.00	1 LembKem asyarakat an	5,000,000.00	1 LembKem asyarakat an	4,700,000.00	0 LembKem asyarakat an	0 LembKem asyarakat an	0 LembKem asyarakat an	0 LembKem asyarakat an	0 LembKem asyarakat an	0.00	1 LembKem asyarakat an	4,700,000.00	1	4,700,000.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-03-2.02-2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0.00	1,00	442,011,100.00	2 Unit	162,766,488.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	63,998,000.00	1 Unit	97,528,000.00	2 Unit	161,526,000.00	3	603,537,100.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-03-2.02-3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0.00	1,002.00	67,528,500.00	5 Pokmas/O rmas	144,698,062.00	3 Pokmas/O rmas	4,121,200.00	2 Pokmas/O rmas	74,184,400.00	2 Pokmas/O rmas	30,601,800.00	1 Pokmas/O rmas	35,715,700.00	8 Pokmas/O rmas	144,623,100.00	92	212,151,600.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0.00		0.00	100,00 %	29,489,500.00	16,67 %	6,935,000.00	100,00 %	11,055,000.00	100,00 %	0.00	100,00 %	11,334,000.00	316,67 %	29,324,000.00	316,67 %	29,324,000.00	316,67	0.00
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-04-7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	0.00		0.00	12,00 Dokumen	29,489,500.00	3,00 Dokumen	6,935,000.00	3,00 Dokumen	11,055,000.00	3,00 Dokumen	0.00	3,00 Dokumen	11,334,000.00	12 Dokumen	29,324,000.00	12 Dokumen	29,324,000.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-03-04-7.03-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0.00	0,00	0.00	1 Laporan	29,489,500.00	1 Laporan	6,935,000.00	1 Laporan	11,055,000.00	0 Laporan	0.00	1 Laporan	11,334,000.00	3 Laporan	29,324,000.00	3	29,324,000.00	0.00	
7-01.0-00.0-00.01-04	KEURAHAN NGANTRU		0.00		700,599,845.00		586,287,600.00		17,092,194.00		82,897,673.00		53,215,127.00		148,091,867.00		301,296,861.00		1,001,896,706.00	0.00	
7-01-7-01.0-00.0-00.01-04-01	PROGRAM PENUNJANG JURISAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0.00		140,611,295.00	100,00 % 100,00 % 100,00 %	146,420,400.00	15,00 % %97,77 %	17,092,194.00	18,84 % %97,77 %	30,118,693.00	39,72 % %97,84 %	24,821,127.00	22,44 % %97,81 %	66,068,867.00	96,00 % %393,19 %	138,100,881.00	96,00 % %393,19 %	278,712,176.00	96,000,00 % 0,00	0.00

	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	102,572,853.00	100.00 %	29,040,000.00	16.00 %	4,480,000.00	16.00 %	5,200,000.00	25.00 %	4,840,000.00	43.00 %	14,520,000.00	100 %	29,040,000.00	100 %	131,612,853.00	0.00			
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.02-2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0.00	6,00	102,572,853.00	12 Dokumen	29,040,000.00	3 Dokumen	4,480,000.00	2 Dokumen	5,200,000.00	3 Dokumen	4,840,000.00	4 Dokumen	14,520,000.00	12 Dokumen	29,040,000.00	18	131,612,853.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	17,630,205.00	100.00 %	13,972,000.00	0.00 %	0.00	16.50 %	3,884,300.00	68.00 %	181,000.00	43.33 %	8,619,725.00	127.83 %	12,685,025.00	127.83 %	30,315,230.00	0.00			
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.06-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0.00	0,00	0.00	1 Paket	800,000.00	0 Paket	0.00	1 Paket	370,000.00	0 Paket	0.00	1 Paket	414,000.00	2 Paket	784,000.00	2	784,000.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.06-4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0.00	10,00	17,630,205.00	10 Paket	1,000,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	10	17,630,205.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.06-5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0.00	0,00	0.00	10 Paket	2,000,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	5 Paket	0.00	5 Paket	1,800,000.00	10 Paket	1,800,000.00	10	1,800,000.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.06-7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0.00	0,00	0.00	10 Paket	8,172,000.00	0 Paket	0.00	2 Paket	3,514,300.00	1 Paket	181,000.00	5 Paket	4,419,125.00	8 Paket	8,114,425.00	8	8,114,425.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.06-9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0.00	0,00	0.00	6 Laporan	2,000,000.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	3 Laporan	0.00	1 Laporan	1,986,600.00	4 Laporan	1,986,600.00	4	1,986,600.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	2,358,237.00	100.00 %	90,158,400.00	16.00 %	12,612,194.00	24.03 %	20,131,393.00	29.17 %	19,800,127.00	37.50 %	32,360,642.00	106.7 %	84,904,356.00	106.7 %	87,262,593.00	0.00			
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.08-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0.00	10,00433,00173.137,00	2,358,237.00	36 Laporan	8,000,000.00	3 Laporan	1,012,194.00	9 Laporan	1,930,788.00	15 Laporan	960,994.00	9 Laporan	1,888,988.00	36 Laporan	5,792,964.00	4.64E+10	8,151,201.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.08-4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0.00	0,00	0.00	12 Laporan	82,158,400.00	3 Laporan	11,600,000.00	4 Laporan	18,200,605.00	2 Laporan	18,839,133.00	3 Laporan	30,471,654.00	12 Laporan	79,111,392.00	12	79,111,392.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		0.00	18,050,000.00	100.00 %	13,250,000.00	0.00 %	0.00	16.67 %	903,000.00	0.00 %	0.00	83.33 %	10,568,500.00	100 %	11,471,500.00	100 %	29,521,500.00	0.00			
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.09-6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0.00	1,00	4,428,000.00	3 Unit	5,100,000.00	0 Unit	0.00	2 Unit	903,000.00	0 Unit	0.00	2 Unit	3,662,000.00	4 Unit	4,565,000.00	5	8,993,000.00	0.00		
	7-01.7-01.0-00.00.01-04-01-2.09-9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0.00	0,00	13,622,000.00	1 Unit	8,150,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	6,906,500.00	1 Unit	6,906,500.00	1	20,528,500.00	0.00		

7-01.7-01.0-00.0-01-04-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0.00	559,988,550.00	100.00 %	401,707,700.00	0.00 %	0.00	30.00 %	37,919,780.00	33.33 %	13,351,000.00	50.00 %	79,023,000.00	113.33 %	130,293,780.00	113.33 %	690,282,330.00	113.33	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-03-2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun		0.00	559,988,550.00	2.00 Dokumen	401,707,700.00	0.00 Dokumen	0.00	1.00 Dokumen	37,919,780.00	1.00 Dokumen	13,351,000.00	1.00 Dokumen	79,023,000.00	3.00 Dokumen	130,293,780.00	3.00 Dokumen	690,282,330.00	3.00	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-03-2.02-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0.00	0.00	1.00 Lembar Kemasyarakatan	5,000,000.00	0.00 Lembar Kemasyarakatan	0.00	1.00 Lembar Kemasyarakatan	2,546,250.00	0.00 Lembar Kemasyarakatan	0.00	0.00 Lembar Kemasyarakatan	0.00	1.00 Lembar Kemasyarakatan	2,546,250.00	1.00	2,546,250.00	1.00	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-03-2.02-2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0.00	1.00	464,259,050.00	2.00 Unit	216,707,700.00	0.00 Unit	0.00	0.00 Unit	0.00	0.00 Unit	0.00	0.00 Unit	0.00	0.00	1.00	464,259,050.00	1.00	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-03-2.02-3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0.00	1,002.00	95,729,500.00	5.00 Pokmas/Ormas	180,000,000.00	0.00 Pokmas/Ormas	0.00	1.00 Pokmas/Ormas	35,373,530.00	1.00 Pokmas/Ormas	13,351,000.00	3.00 Pokmas/Ormas	79,023,000.00	5.00 Pokmas/Ormas	127,747,530.00	62.00	223,477,030.00	62.00	0.00
7-01.7-01.0-00.0-04-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM			0.00	0.00	100.00 %	38,159,500.00	0.00 %	0.00	0.00 %	14,859,200.00	100.00 %	15,043,000.00	0.00 %	3,000,000.00	100.00 %	32,902,200.00	100.00 %	32,902,200.00	100.00	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-04-7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun		0.00	0.00	12.00 Dokumen	38,159,500.00	0.00 Dokumen	0.00	3.00 Dokumen	14,859,200.00	3.00 Dokumen	15,043,000.00	6.00 Dokumen	3,000,000.00	12.00 Dokumen	32,902,200.00	12.00 Dokumen	32,902,200.00	12.00	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-04-7.03-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0.00	0.00	1.00 Laporan	38,159,500.00	0.00 Laporan	0.00	1.00 Laporan	14,859,200.00	3.00 Laporan	15,043,000.00	0.00 Laporan	3,000,000.00	4.00 Laporan	32,902,200.00	4.00	32,902,200.00	4.00	0.00	
7-01.0-00.0-00.01-05	KELURAHAN TAMANAN			0.00	662,159,849.00		490,081,250.00		16,702,389.00		80,356,143.00		173,805,682.00		197,547,866.00		468,412,080.00		1,130,571,929.00		0.00	
7-01.7-01.0-00.0-01-05-01	PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			0.00	117,160,899.00	100.00 % %100.00 %100.00 %	122,562,000.00	15.00 % %0.00 %97.77 %	8,428,939.00	21.12 % %0.00 %97.77 %	27,604,943.00	26.00 % %0.00 %97.84 %	31,003,782.00	34.22 % %0.00 %97.81 %	46,030,316.00	96.34 % %0.00 %391.19 %	113,067,980.00	96.34 % %0.00 %391.19 %	230,228,879.00	96.340,000.00	0.00	
7-01.7-01.0-00.0-01-05-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan		0.00	66,929,480.00	100.00 %	28,140,000.00	25.00 %	3,840,000.00	25.00 %	6,960,000.00	25.00 %	5,760,000.00	25.00 %	11,580,000.00	100 %	28,140,000.00	100 %	95,069,480.00		0.00	

		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.02-2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	6,00	66,929,480.00	12 Dokumen	28,140,000.00	3 Dokumen	3,840,000.00	3 Dokumen	6,960,000.00	3 Dokumen	5,760,000.00	3 Dokumen	11,580,000.00	12 Dokumen	28,140,000.00	16	95,069,480.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00		26,038,506.00	100.00 %	24,390,500.00	0.00 %	0.00	10.50 %	4,799,850.00	38.00 %	4,570,750.00	52.67 %	12,233,100.00	101.17 %	21,603,700.00	101.17 %	47,642,206.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.06-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	1 Paket	1,605,500.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	1 Paket	1,595,000.00	1 Paket	1,595,000.00	1	1,595,000.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.06-4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0.00	12,00	26,038,506.00	10 Paket	1,000,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	9 Paket	792,000.00	9 Paket	792,000.00	21	26,830,506.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.06-5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	10 Paket	2,000,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	10 Paket	1,995,000.00	0 Paket	0.00	10 Paket	1,995,000.00	10	1,995,000.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.06-7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	10 Paket	16,785,000.00	0 Paket	0.00	2 Paket	4,799,850.00	4 Paket	2,575,750.00	4 Paket	8,230,100.00	10 Paket	15,605,700.00	10	15,605,700.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.06-9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0,00	0.00	6 Laporan	3,000,000.00	0 Laporan	0.00	0 Laporan	0.00	3 Laporan	0.00	2 Laporan	1,616,000.00	5 Laporan	1,616,000.00	5	1,616,000.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00		3,635,413.00	100.00 %	47,950,000.00	23.00 %	4,588,939.00	27.88 %	15,845,093.00	25.00 %	10,194,532.00	25.00 %	13,063,716.00	100.88 %	43,692,280.00	100.88 %	47,327,693.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.08-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	10,00915,5281,00	3,635,413.00	48 Laporan	9,590,000.00	3 Laporan	1,888,939.00	12 Laporan	1,801,687.00	21 Laporan	1,791,591.00	12 Laporan	1,914,567.00	48 Laporan	7,396,784.00	5.89E+12	11,032,197.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.08-4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	12 Laporan	38,360,000.00	2 Laporan	2,700,000.00	4 Laporan	14,043,406.00	3 Laporan	8,402,941.00	3 Laporan	11,149,149.00	12 Laporan	36,295,496.00	12	36,295,496.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0.00		20,557,500.00	100.00 %	22,081,500.00	0.00 %	0.00	16.67 %	0.00	75.00 %	10,478,500.00	75.00 %	9,153,500.00	166.67 %	19,632,000.00	166.67 %	40,189,500.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.09-6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	2,00	5,896,500.00	4 Unit	6,060,800.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	2 Unit	2,486,000.00	2 Unit	1,283,500.00	4 Unit	3,769,500.00	6	9,666,000.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-01-2.09-9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0,00	14,661,000.00	1 Unit	16,020,700.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	7,992,500.00	1 Unit	7,870,000.00	2 Unit	15,862,500.00	2	30,523,500.00	0.00
		7-01.7-01.0-00.00.01-05-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0.00		544,998,950.00	100.00 %	329,359,750.00	10.00 %	8,273,450.00	20.00 %	45,204,600.00	50.00 %	122,198,900.00	50.00 %	146,852,650.00	130.00 %	322,529,600.00	130.00 %	867,528,550.00	130.00 %

7-01.7-01.0-00.0-05-03-2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	0.00	544,998,950.00	2.00 Dokumen	329,359,750.00	1.00 Dokumen	8,273,450.00	1.00 Dokumen	45,204,600.00	1.00 Dokumen	122,198,900.00	1.00 Dokumen	146,852,650.00	4 Dokumen	322,529,600.00	4 Dokumen	867,528,550.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-03-2.02-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00	0.00	1 LembKem asyarakat an	5,000,000.00	1 LembKem asyarakat an	4,273,500.00	0 LembKem asyarakat an	0.00	0 LembKem asyarakat an	0.00	0 LembKem asyarakat an	0.00	1 LembKem asyarakat an	4,273,500.00	1	4,273,500.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-03-2.02-2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0.00	452,059,450.00	2 Unit	150,840,250.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	49,208,000.00	1 Unit	100,546,000.00	2 Unit	149,754,000.00	3	601,813,450.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-03-2.02-3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0.00	1,002.00	5 Pokmas/O rmas	173,519,500.00	2 Pokmas/O rmas	3,999,950.00	2 Pokmas/O rmas	45,204,600.00	1 Pokmas/O rmas	72,990,900.00	0 Pokmas/O rmas	46,306,650.00	5 Pokmas/O rmas	168,502,100.00	62	261,441,600.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM		0.00	0.00	100.00 %	38,159,500.00	0.00 %	0.00	100.00 %	7,546,600.00	100.00 %	20,603,000.00	0.00 %	4,664,900.00	200.00 %	32,814,500.00	200.00 %	32,814,500.00	200.00	0.00				
7-01.7-01.0-00.0-05-04-7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang disusun	0.00	0.00	12.00 Dokumen	38,159,500.00	0.00 Dokumen	0.00	3.00 Dokumen	7,546,600.00	3.00 Dokumen	20,603,000.00	6.00 Dokumen	4,664,900.00	12 Dokumen	32,814,500.00	12 Dokumen	32,814,500.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-04-7.03-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	1 Laporan	38,159,500.00	0 Laporan	0.00	1 Laporan	7,546,600.00	3 Laporan	20,603,000.00	0 Laporan	4,664,900.00	4 Laporan	32,814,500.00	4	32,814,500.00	0.00					
7-01.0-00.0-00.01-06	KELURAHAN KELUTAN		0.00	738,823,447.00		469,775,790.00		46,742,001.00		90,948,783.00		137,852,583.00		186,660,594.00		462,203,961.00		1,201,027,408.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0.00	152,190,597.00	100.00 % %100.00 %	127,881,500.00	24.04 % %97.77 %	14,835,001.00	27.79 % %97.77 %	34,435,083.00	33.44 % %97.84 %	41,447,233.00	14.63 % %97.81 %	34,162,794.00	99.90 % %391.19 %	124,880,111.00	99.90 % %391.19 %	277,070,708.00	99,900.00 0.00	0.00				
7-01.7-01.0-00.0-05-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00	94,729,297.00	100.00 %	29,040,000.00	0.00 %	0.00	25.00 %	7,110,000.00	50.00 %	14,220,000.00	25.00 %	7,110,000.00	100 %	28,440,000.00	100 %	123,169,297.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-01-2.02-2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.00	6.00	12 Dokumen	29,040,000.00	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	7,110,000.00	7 Dokumen	14,220,000.00	3 Dokumen	7,110,000.00	12 Dokumen	28,440,000.00	12	123,169,297.00	0.00					
7-01.7-01.0-00.0-05-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00	32,133,500.00	100.00 %	17,718,200.00	20.00 %	3,108,629.00	30.50 %	5,629,100.00	25.33 %	3,145,550.00	27.00 %	4,719,700.00	102.83 %	16,602,979.00	102.83 %	48,736,479.00	0.00					

	7-01.7-01.0-00.0-01-06-01-2.06-1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	1 Paket	1,180,000.00	0 Paket	0.00	1 Paket	1,175,500.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	1 Paket	1,175,500.00	1	1,175,500.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.06-4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0.00	24.00	32,133,500.00	10 Paket	1,000,000.00	1 Paket	242,000.00	1 Paket	242,000.00	5 Paket	242,000.00	3 Paket	247,500.00	10 Paket	973,500.00	34	33,107,000.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.06-5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	10 Paket	2,000,000.00	1 Paket	398,500.00	2 Paket	545,250.00	4 Paket	520,500.00	3 Paket	530,750.00	10 Paket	1,995,000.00	10	1,995,000.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.06-7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	12 Paket	10,038,200.00	1 Paket	2,468,129.00	2 Paket	3,028,350.00	6 Paket	2,383,050.00	3 Paket	2,111,450.00	12 Paket	9,990,979.00	12	9,990,979.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.06-9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0.00	0.00	6 Laporan	3,500,000.00	0 Laporan	0.00	2 Laporan	638,000.00	1 Laporan	0.00	3 Laporan	1,830,000.00	6 Laporan	2,468,000.00	6	2,468,000.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	0.00	3,275,250.00	100.00 %		66,721,800.00	25.00 %	10,814,872.00	27.88 %	19,581,483.00	25.00 %	15,584,683.00	33.33 %	19,885,094.00	111.21 %	65,866,132.00	111.21 %	69,141,382.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.08-2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	20,005.58, 0.00	0.00	48 Laporan	8,000,000.00	3 Laporan	1,803,250.00	12 Laporan	1,764,050.00	21 Laporan	2,067,250.00	12 Laporan	1,861,850.00	48 Laporan	7,496,400.00	6.86E+11	10,771,650.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.08-4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0.00	0.00	12 Laporan	58,721,800.00	3 Laporan	9,011,622.00	4 Laporan	17,817,433.00	3 Laporan	13,517,433.00	2 Laporan	18,023,244.00	12 Laporan	58,369,732.00	12	58,369,732.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0.00	22,052,550.00	100.00 %		14,401,500.00	0.00 %	911,500.00	33.33 %	2,114,500.00	75.00 %	8,497,000.00	50.00 %	2,448,000.00	158.33 %	13,971,000.00	158.33 %	36,023,550.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.09-6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	2.00	8,690,000.00	2 Unit	7,360,000.00	1 Unit	911,500.00	1 Unit	2,114,500.00	1 Unit	1,485,000.00	2 Unit	2,448,000.00	5 Unit	6,959,000.00	7	15,649,000.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-01-2.09-9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0.00	13,362,550.00	1 Unit	7,041,500.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	1 Unit	7,012,000.00	0 Unit	0.00	1 Unit	7,012,000.00	1	20,374,550.00	0.00	
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0.00	586,632,850.00	100.00 %		309,950,790.00	20.00 %	27,298,500.00	26.67 %	47,100,200.00	50.00 %	83,866,400.00	50.00 %	148,618,500.00	146.67 %	306,883,600.00	146.67 %	893,516,450.00	146.67	0.00
	7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-03-2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kelurahan yang disusun	0.00	586,632,850.00	2.00	2.00 Dokumen	309,950,790.00	1.00	27,298,500.00	1.00	47,100,200.00	1.00	83,866,400.00	1.00	148,618,500.00	4.00	306,883,600.00	4.00	893,516,450.00	0.00	

		7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-03-2.02-1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00	0,00	0,00	1 LembKem asyarakat an	5,000,000.00	1 LembKem asyarakat an	4,931,300.00	0 LembKem asyarakat an	0,00	0 LembKem asyarakat an	0,00	0 LembKem asyarakat an	0,00	1 LembKem asyarakat an	4,931,300.00	1	4,931,300.00		0,00
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-03-2.02-2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0,00	1,00	427,598,200.00	2 Unit	156,429,870.00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	48,658,000.00	1 Unit	106,685,000.00	2 Unit	155,343,000.00	3	582,941,200.00		0,00
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-03-2.02-3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00	1,002.00	159,034,650.00	5 Pokmas/O rmas	148,520,920.00	5 Pokmas/O rmas	22,367,200.00	2 Pokmas/O rmas	47,100,200.00	2 Pokmas/O rmas	35,208,400.00	1 Pokmas/O rmas	41,933,500.00	10 Pokmas/O rmas	146,609,300.00	112	305,643,950.00		0,00
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-04	PROGRAM KOORDINASI KETRINAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0,00	100,00 %	31,943,500.00	100,00 %	4,608,500.00	100,00 %	4,608,500.00	100,00 %	9,413,500.00	100,00 %	12,538,950.00	100,00 %	3,879,300.00	400,00 %	30,440,250.00	400,00 %	30,440,250.00	400,00	0,00
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-04-7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum yang disusun		0,00	12,00	31,943,500.00	3,00 Dokumen	4,608,500.00	3,00 Dokumen	4,608,500.00	3,00 Dokumen	9,413,500.00	3,00 Dokumen	12,538,950.00	3,00 Dokumen	3,879,300.00	12 Dokumen	30,440,250.00	12 Dokumen	30,440,250.00		0,00
		7-01.7-01.0-00.0-00.01-06-04-7.03-1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0,00	0,00	31,943,500.00	1 Laporan	4,608,500.00	1 Laporan	4,608,500.00	1 Laporan	9,413,500.00	3 Laporan	12,538,950.00	1 Laporan	3,879,300.00	6 Laporan	30,440,250.00	6	30,440,250.00		0,00
Rata-rata capaian kinerja program (%)										9,62	11,60	58,15	20,62	135,20	23,50	174,38	34,40	377,30	90,18					
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										23,04	5,311,17	8,810,64	12,572,39	26,717,24										
Rata-rata capaian kinerja subkegiatan (%)										23,90	77,21	158,31	190,77	450,19										
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya:																								